Penelitian Kompetitif

BOPTN DIKTIS

Penelitian Dasar Interdisipliner

Polarisasi Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di Lingkungan Perguruan Tinggi Jember terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pascapenetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017

IAIN JEMBER

DISUSUN OLEH

Dr. Akhiyat, S.Ag.,M.Pd.

Dr. Win Usuluddin, M. Hum.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

2018

Abstract

This study aims to find out the views of HTI activists in Jember College in understanding the Republic of Indonesia (NKRI) Pancasila and Unitary State. After the dissolution of HTI by the State in accordance with Perpu No.2 2017, in addition to knowing forms of polarization among HTI activists in the Jember College in behaving and understanding the Pancasila and the Unitary State of the Republic of Indonesia after the dissolution of HTI by the state. To achieve the objectives of this study, researchers used the theory of symbolic interactionism. This theory is used to analyze the symbols used by HTI activists in interpreting the Pancasila and the Unity of the Republic of Indonesia. The subjects in this study were HTI activists in the Jember College. While data collection is done through interviews and observation. The results found in this study include: (1) That symbolic interactionism of HTI activists in Jember Higher Education in their views on Pancasila and NKRI, they interpret the concept as a form of state teaching that has no Islamic basic concept because it is incompatible with the concept of the Koran and Assunnah, and interpret the Pancasila and NKRI as the concept of teaching Western capitalism. (2) The forms of polarization of their views in interpreting the Pancasila and NKRI are due to their limited knowledge and understanding of the teachings of the Qur'an and Assunnah, and handbooks that guide HTI activists are understood textually and leterlek. So that those who are trapped with textual understanding eventually tend to disagree with Pancasila and NKRI, on the contrary for HTI activists whose understanding and knowledge are wider and not closed to other Islamic groups, they have begun to open up and accept the Pancasila and the NKRI concept even though not transparent.
Keywords: HTI Activist Polarization, Pancasila and NKRI, Perppu No. 2 of 2017

Polarisasi Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di Lingkungan Perguruan Tinggi Jember terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pascapenetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.
Dr. Win Usuluddin, M. Hum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan aktivis HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Jember dalam memahami Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pascadibubarkannya HTI oleh Negara sesuai Perpu No.2 Tahun 2017, di samping itu pula untuk mengetahui bentuk-bentuk polarisasi di antara aktivis HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Jember dalam bersikap serta memahami Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pascadibubarkannya HTI oleh negara. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik. Teori ini digunakan untuk menganalisis simbol-simbol yang dipakai aktivis HTI dalam memaknai Pancasila dan Negaara Kesatuan Republik Indonesia. Subyek dalam penelitian ini adalah para aktivis HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Jember. Sementara pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: (1) Bahwa interaksionisme simbolik aktivis HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Jember dalam pandangannya terhadap Pancasila dan NKRI, mereka memaknai konsep tersebut sebagai bentuk ajaran bernegara yang tidak memiliki konsep dasar Islami karena tidak sesuai dengan konsep Alquran dan Assunnah, serta memaknai Pancasila dan NKRI sebagai konsep ajaran kapitalisme Barat. (2) Bentuk-bentuk polarisasi pandangan mereka dalam memaknai Pancasila dan NKRI disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap ajaran Alquran dan Assunnah, serta buku-buku pegangan yang menjadi pedoman aktivis HTI dipahami secara tekstual dan leterlek. Sehingga mereka yang terjebak dengan pemahaman tekstual akhirnya cenderung tidak setuju dengan Pancasila dan NKRI, sebaliknya bagi aktivis HTI yang pemahaman dan pengetahuan mereka lebih luas dan tidak tertutup dengan kelompok-kelompok Islam lain, mereka sudah mulai terbuka dan menerima Pancasila dan konsep NKRI meskipun tidak secara transparan.

Kata Kunci: Polarisasi Aktivis HTI, Pancasila dan NKRI, Perppu No 2 Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang menciptakan alam semesta dengan seluruh realitas dan segala isi yang ada di dalamnya. Semata-mata karena takdirNya, penelitian ini dapat terselesaikan dengan segala keterbatasan dan curahan tenaga yang melelahkan, meskipun demikian peneliti berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan tugas tersebut di tengah-tengah kesibukan yang peneliti cukup berat bersamaan dengan aktivitas perkuliahan atau studi yang sedang berlangsung untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Walaupun demikian penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan juga, karena adanya dorongan dari tim peneliti yang membantu secara maksimal untuk mengisi dan mengkritisi celah kekurangan penelitian yang sedang dihadapi. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terhadirkan kepada Nabi Muhammad saw. seorang utusan yang telah menunjukkan kepada umat manusia jalan kebenaran yang diakui secara universal.

Penelitian ini yang ada di hadapan pembaca dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan Laporan Penelitian Interdisipliner tahun 2018. Diharapkan dengan adanya penelitian ini semakin meningkatkan kuaalitas kompetensi dosen, terutama bagi kami selaku peneliti dan dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Peneliti menyadari bahwa tersusunnya laporan penelitian ini atas peran dan kerjasama berbagai pihak Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca selalu kami nantikan. Akhirnya, semoga laporan penelitian ini dapat membantu dan memberikan manfaat untuk penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis.

Ketua Peneliti,

Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197112172000031001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Persetujuan
Abstrak
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Kajian Teori (Sosiologi: Interaksionisme Simbolik) 11
G. Metode Penelitian 14
1. Tipe Penelitian 14
2. Tahapan Penelitian 14
3. Sumber Data 15
4. Analisis Hasil 15
5. Paradigma Penelitian 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIZBUT TAHRIR DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA 18
A. Sejarah Umum Hizbut Tahrir 18
B. Gagasan Hizbut Tahrir 22
C. Upaya Sistematis Hizbut Tahrir Membangun Masyarakat Islami 25
D. Hizbut Tahrir Indonesia 27
E. Strategi Dakwah HTI Dan Relevansinya Dengan Sistem Dakwah Yang Digeraakkan Oleh Organisasi Atau Lembaga Islam Lainnya 30
F. Gerakan HTI Pascareformasi 39
G. Jejak Arena Perjuangan HTI 40
H. Dualisme Yang Takterpisahkan: Dakwah dan Politik 43
I. Strategi Dakwah HTI 47

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 58
A. Pandangan Aktivis HTI di Perguruan Tinggi Jember terhadapPancasila dan NKRI Pascapenetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 58
1. Interaksionisme Simbolik Aktivis HTI dan Pemerintah RI; Pancasila Dan NKRI Sebagai Wujud Interaksionisme Simbolik 58
2. Pikiran (mind) dan Konsep Diri (self) Aktivis HTI terhadap Pancasila dan NKRI Pascapenetapan Perppu Nomor 2 tahun 2017 ... 64
B. Bentuk-bentuk Polarisasi Aktivis HTI di perguruan Tinggi Jember terhadap Pancasila dan NKRI Pasca ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 67

BAB IV PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
1. Pandangan Aktivis HTI 69
2. Polarisasi di Internal Aktivis HTI 69
B. Implikasi Teoretik 70
C. Keterbatasan Studi 70
D. Rekomendasi 71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di lingkungan Perguruan Tinggi Jember memiliki beragam pandangan. Peluang perlawanan dan penolakan terhadap ideologi negara, mulai awal berdirinya Indonesia meredeka sejak orde lama sampai pascareformasi saat ini masih menyisakan polemik berkelanjutan, seakan tidak akan pernah habis. Tidak semua kalangan mahasiswa maupun dosen yang mayoritas muslim di lingkungan Perguruan Tinggi Jember dapat menerima ideologi Pancasila dan NKRI, terutama aktivis HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Bagi mereka, bahwa ideologi Pancasila dan NKRI tidak sepenuhnya dapat diterima oleh kelompok mereka, sebab yang diinginkan kelompok mereka bentuk negara Indonesia menjadi khilafah berdasarkan hukum Islam.

Dari realitas yang berkembang belakangan, dapat dikatakan bahwa gerakan Islam saat ini yang paling fokus memperjuangkan terwujudnya khilafah Islamiyah di Indonesia dan di belahan dunia mana pun adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional, organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai mazhabnya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik yang hingga kini di Indonesia belum menyebut dirinya sebagai gerakan politik (partai). Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa/ inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.[1]

Sejak awal berdirinya tahun 1953 di Al-Quds Palestina, organisasi ini memiliki cita-cita besar, yakni melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menegakkan nilai-

[1]http//www.al-islam.or.id

nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, Hizbut Tahrir berpendirian harus dilakukan melalui negara, dalam hal ini Hizbut Tahrir menekankan pada Daulah Islamiyah atau daulah khilafah yang dipimpin oleh seorang khilafah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Khilafah tersebut harus dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah RasulNya dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad.[2] Kemajuan umat Islam harus diraih dengan pencerahan dan mencerdaskan. Karena itu Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan kemuliaan seperti dulu.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, kekuatan-kekuatan Islam harus membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan dalam berbagai dimensi kehidupan, membebaskan umat dari pemikiran-pemikiran dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara sekuler. Negara-negara di dunia, termasuk Islam, tengah mempraktikkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang menurut pandangan Hizbut Tahrir sudah jauh dari misi Islam. Artinya negara-negara muslim sudah banyak meniru pola kehidupan masyarakat Barat yang tidak Islami dan mengadopsi sistem hukum yang tidak bersumber dari Islam. Kondisi semacam inilah yang menurut Hizbut Tahrir harus diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan Islam agar pemerintahan dikendalikan dengan sistem hukum Islam dan menentang segala bentuk perundang-undangan serta pikiran-pikiran yang kufur.

Dengan menolak segala macam hegemoni Barat, Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan *fikrah* dan *thariqah*. Semua ide, pendapat dan hukum yang hanya berasal dari Islam.[3] Segala sesuatu yang tidak berasal dari Islam bukan merupakan bagian dari setiap sikap dan pandangan Hizbut Tahrir. Seluruh gagasan yang muncul dari Hizbut Tahrir hanya bersumber dari Islam, sesuatu

[2]Hizbuttahrirut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis* (Jakarta: Pustaka Thoriqul Izzah, 2000), 20.

[3]Ahmad Arupatria, *Gerakan Hizbut Tahrirut Tahrir*: Kajian Tentang Teologi dan Perjuangan Politik dalam Upaya Mendirikan Daulah Islamiyah (Yogyakarta: Skripsi UPN, 2003), 115.

yang tidak Islami pasti tidak laku dan tidak menjadi pedoman dalam Hizbut Tahrir.

Pendirian Hizbut Tahrir yang tegas ini merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari gerakan politik dan cita-cita untuk mendirikan khilafah Islamiyah, yakni kepemimpinan tunggal umat Islam, setelah khilafah Islamiyah di Turki Ustmani dihancurkan oleh kekuatan kapitalisme Barat. Untuk mewujudkan ide-ide, gagasan dan pandangannya, Hizbut Tahrir menempuh cara-cara politik dan tidak dengan cara-cara yang lain. Cara politik efektif untuk mencapai tujuan terbentuknya khilafah Islamiyah. Sasaran utama dari jalan yang ditempuh ini merupakan usaha untuk mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat agar mereka menerima, mengamalkan dan turut mengembangkannya agar bisa segera terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan. Tugas tersebut merupakan kewajiban setiap muslimin baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana kewajiban yang sama telah dilaksanakan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. Tugas tersebut juga merupakan tugas bersama kaum muslimin di seluruh dunia.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam merupakan ideologi bagi negara, bagi masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia. Islam adalah bagian integral yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam juga telah memerintahkan untuk mendirikan suatu negara dan pemerintahannya dan memerintah dengan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang tidak bersumber pada Islam. Alquran telah menegaskan dalam QS. an-Nisa (4): 59 "Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, serta *ulil amri* (para pemimpin di antara kalian). Berkaitan mengenai penegakan hukum, QS. al-Maidah (5): 48 memberi pedoman untuk memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan. Ayat ini telah jelas mengenai ketentuan Islam tentang pemerintahan dan proses penyelenggaraannya.

Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tablig akbar dan demonstrasi. Terdiri dari dua hal inilah merupakan cara Hizbut

Tahrir menyuarakan gagasan politik Islamnya. Menurut salah seorang pengurusnya, Hizbut Tahrir tidak akan menjadi partai politik untuk saat ini di Indonesia, tetapi akan berjuang secara ekstra parlementer. Kelembagaan politik Indonesia menurutnya menyulitkan sekaligus tidak efektif bagi Hizbut Tahrir untuk memperjuangkan gagasan khilafah Islamiyah, bahkan muncul "ketakutan" akan terjerumus ke dalam kepentingan-kepentmgan politik sesaat yang justru akan mengurangi bobot perjuangan Islam di masa depan. Konsep pemerintahan Islam akan terus diperjuangkan meski saat ini masih bersifat ekstra parlementer dengan menggelar seminar, dialog, diskusi, tablig akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum. Gerakan ini tidak bersifat lokal tetapi menyebar ke seluruh belahan dunia. Pendiri jamaah Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani telah meninggalkan beberapa konsep pemerintahan Islam yang oleh pengikutnya akan terus diperjuangkan hingga terealisasi. Hizbut Tahrir Indonesia masih memprioritaskan pembinaan jamaah, menurut salah seorang yang aktif dalam Hizbut Tahrir, suatu saat Hizbut Tahrir Indonesia akan menjadi kekuatan politik resmi untuk dapat memperjuangkan cita-cita politiknya. Hizbut Tahrir merupakan fenomena baru yang menarik untuk dikaji, mengingat gagasan dan praksisnya berbeda dengan kebanyakan jamaah lain yang pernah ada di Indonesia. Disebut demikian, karena agenda-agenda politik yang diperjuangkan oleh jamaah ini berdasarkan tradisi Islam periode awal sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, khilafah dalam dinasti Muawiyyah dan Abbasyiyah hingga khilafah Turki Ustmani yang ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Attaturk pada1924. Jamaah ini meletakkan dasar perjuangan pada Alquran dan Sunnah Nabi seperti juga jamaah-jamaah Islam lainnya. Untuk membangkitkan, menyadarkan, mendidik umat serta menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, Hizbut Tahrir harus merujuk sepenuhnya kepada Quran dan Sunnah, apalagi untuk memperjuangkan terbentuknya daulah Islamiyah.

Bagi Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan Islam merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena Nabi telah berhasil menegakkan Islam dan memperluas pengaruhnya selama lebih kurang sepuluh tahun di

Madinah[4] dan pada masa itu umat Islam telah banyak dan wilayah kekuasaan Nabi yang berpusat di Madinah telah meluas dan hampir mencakup seluruh jazirah Arabia. Bangunan Kota Madinah diilandasi oleh tiga pilar yaitu pemikiran (*fikriyah*), politik (*siyasyah*) dan tanpa kekerasan (*la maadiyah*).[5] Keberhasilan Rasulullah membangun umat di atas pluralisme agama di Madinah merupakan representasi konkret betapa Islam dapat memberikan alternatif yang paling aman, damai bagi seluruh umat manusia.

Di kalangan sivitas akademika Perguruan Tinggi, aktivis HTI dalam perkembangannya dengan adanya kebijakan dari Menristekdikti tentang pelarangan organisasi yang memiliki paham anti Pancasila dan NKRI di Perguruan Tinggi, setidaknya orientasi gerakannya akan menempuh jalan berliku. Gerakan HTI tentu akan memiliki strategi tertentu agar ideologi yang diusungnya dapat mencapai sasaran. Selain itu, masih terbuka jalan lain dengan sedikit merubah haluan ideologinya. Tidak menutup kemungkinan jalan yang ditempuh dengan melakukan pembelaan-pembelaan dan perlawanan serta mempertahankan ideologi yang menjadi keyakinan aktivisnya.

Sebagian di antara mereka juga memiliki pandangan yang ekstrem kekirian. Mereka menginginkan Indonesia sebagai negara khilafah, ideologi Pancasila dan NKRI dalam pemahamannya boleh dikatakan sebagai ideologi

---

[4]Selama lebih dari sepuluh tahun (+13 tahun) di Mekah Rasulullah Muhammad saw. berjuang untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat Mekah, namun dakwah tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dengan petunjuk dari Allah SWT, Nabi melakukan perjalanan (hijrah) dengan para sahabat dari Mekah menuju Yastrib (+ 400 KM arah utara Mekah), sebelum sampai di Yastrib Nabi beserta sahabatnya disambut oleh putra-putri dengan suara merdu melagukan nyanyian selamat datang: *Thala' al badru 'alaina* -bulan purnama telah menjelma *min tsanyyatil wadaa'i* - menerima dakwah Islam *Wajaba Syukru 'alaina* - dari celah-celah barisan bukit *Maada aalillahi daa'i* - wahai utusan pendatang kami *Aiyuh al mab'uustu fiina* -keharusan bersyukur bagi kita *Ji'ta bil Amril muthaa'i* - Tuan membawa perintah Ilahi. Sesampainya di Yastrib pada sore hari Jum'at tanggal 16 Ra-biul Awal tahun pertama Hijriyah (20 September 622 M) Nabi pertama-tama mendirikan Masjid sebagai pusat segala kegiatan termasuk untuk ekonomi, politik dan masalah umat lainnya. Masjid menjadi markas besar untuk urusan pemerintahan yang baru diproklamirkan sekaligus menjadi tempat suci, rumah Allah. Segala dakwah Islam berjalan lancar dan sukses bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Nabi di Mekah. Kota Yastrib diganti namanya menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi) dan dari kota inilah Nabi untuk pertama kalinya membuat kesepakatan dengan segala unsur yang heterogen dalam masyarakat untuk bersama-sama membangun masyarakat Madinah.

[5]Untuk uraian mengenai pola pembinaan umat yang tidak menggunakan kekerasan atau anarkis. Lihat Hizbut Tahrirut Tah-rir Indonesia, *Dakwah Islam Tanpa Kekerasan* (Indonesia: HTI, 2003), 3.

yang menyesatkan dan dapat merusak pemahaman keagamaannya. Dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda di kalangan sivitas akademika kampus, mereka memiliki sudut pandang yang kontradiktif. Sebagian dari mereka dimungkinkan dapat menerima dan mempertahankan keberadaan ideologi Pancasila dan NKRI. Di lain pihak terbuka peluang mereka menolak keberadaan ideologi Pancasila dan NKRI, karena dianggap dapat merusak keyakinan mereka sebagai penganut muslim.

Semenjak dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menuai pro dan kontra. Salah satu yang dikorbankan adalah HTI, realitas di lapangan pengikut organisasi tersebut masih eksis di berbagai ranah kehidupan, termasuk di dalam sivitas akademika. Secara yuridis, dapat dikatakan organisasi tersebut sudah tiada atau mati suri, akan tetapi penganut dan aktivis organisasi terlarang tersebut masih dapat bebas mengekspresikan ideologi-ideologi mereka secara leluasa, dan tidak menutup kemungkinan pengikut mereka semakin besar. Boleh dikatakan untuk sementara waktu organisasi tersebut tanpa nama atau tanpa bentuk, lambat laun kemungkinan besar terbuka lebar bermetamorfosis menjadi organisasi dengan bentuk dan nama lain yang gerakannya akan semakin masif, hal ini akan dapat mengancam terhadap keberadaan ideologi Pancasila dan NKRI.

Berangkat dari realitas yang terjadi di lapangan bahwa pada tataran praksis gerakan HTI yang terdapat di kalangan kampus atau Perguruan Tinggi memiliki berbagai warna pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Di antara dari pengikut mereka dalam menilai ideologi Pancasila dan NKRI dimungkinkan terdapat persepsi yang menyetujui, akan tetapi dengan suatu syarat tertentu. Bahkan, dimungkinkan terdapat pemahaman yang menolak secara keras ideologi Pancasila dan NKRI. Dari realitas yang terjadi di lapangan itulah bila dikaji secara mendalam pandangan aktivis HTI di Perguruan Tinggi Jember dalam meneropong terhadap ideologi Pancasila dan NKRI akan dapat ditemukan beragam warna pemahaman dan penilaian menurut kaca mata mereka. Peneliti memiliki asumsi setidaknya, akan muncul paradigma-paradigma baru yang berbeda dari asumsi sebelumnya. Berawal

dari asumsi-asumsi itulah penelitian ini menarik untuk di kaji sehingga diharapkan menemukan paradigma baru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan aktivis HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Jember dalam memahami Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pascadibubarkannya HTI oleh Negara sesuai Perpu No.2 Tahun 2017?
2. Bagaimana bentuk-bentuk polarisasi di antara aktivis HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Jember dalam bersikap serta memahami Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pascadibubarkannya HTI oleh negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh pengetahuan terhadap pandangan aktivis HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Jember dalam memahami Pancasila dan NKRI Pascadibubarkannya HTI oleh Negara sesuai Perpu No. 2 Tahun 2017.
2. Mengetahui bentuk-bentuk polarisasi di antara aktivis HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Jember dalam bersikap serta memahami Pancasila dan NKRI Pascadibubarkannya HTI oleh Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran secara teoretis dan praktis sekaligus. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk:

1. Memberikan pandangan baru terhadap khazanah keilmuan Islam dalam hal pemikiran tentang negara secara demokratis, moderat, dan mengembangkan sikap toleran dari berbagai keyakinan warga negara yang memiliki beragam ideologi.
2. Memberikan pandangan kepada para akademis kajian politik Islam mengenai bentuk-bentuk negara yang sesuai dengan pandangan masyarakatnya terdiri dari berbagai keyakinan berbeda.
3. Memberikan sumbangsih teoretis bagi perkembangan ilmu politik Islam,

khususnya tentang pemikiran politik negara yang terdiri dari multi etnis dan keyakinan.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) telah banyak dilakuakn oleh para peneliti dalam dan luar negeri, baik yang berkaitan dengan pola pikir HTI maupun perannya dalam masyrarakat. Hal ini dikarenakan kajian HTI banyak memiliki berbagai pemahaman terhadap bentuk-bentuk negara sesuai dengan keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah berdasarkan syariat Islam. Karena dalam realitanya bahwa kemerdekaan yang diraih oleh masyarakat dan pendiri bangsa sudah menjadi kebijakan bersama, bagaimana merumuskan bentuk negara Indoesia yang sesuai dengan karakter masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Sehingga menarik sekali dikaji pengikut HTI pascadibubarkannya oleh negara karena dianggap bahwa organisasi tersebut ingin menggulinggkan pemerintahan yang sah. Hal inilah yang menjadikan kajian HTI menarik minat para peneliti, di tengah-tengah arus harmonisasi yang digalakkan pemerintah, namun sebagian warganya ingin memberontak keberadaan bentuk negara yang sah, dan ideologi negara ditolaknya karena dianggapnya bertentangan dengan keyakinan mereka, sehingga kajian HTI ini perlu untuk mengkaji lebih mendalam.

Dalam penelitian ini akan disebutkan beberapa di antara penelitian terutama yang terkait langsung dengan tema penelitian ini, di antaranya adalah Haedar Nashir[6] dalam penelitiannya fokus pada wacana gerakan Islam salafiyah di beberapa wilayah Indonesia yang mencoba menerapkan syariat Islam seperti Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), wilayah Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya, termasuk dua gerakan fundamentalis Islam HTI dan MMI. Pembahasan tentang HTI dan MMI, serta organisasi Islam ideologis lainnya ini lebih difokuskan pada karakteristiknya yang legal-formal, doktriner, dan

[6]Haedar, Nashir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. (Jakarta: PSAP, 2007).

militan dalam memperjuangkan penegakan syariat Islam dan konsep khilafah yang akan memayungi pelaksanaan syariat Islam. Sifat legal formal ditunjukkan dengan kecenderungan menampilkan Islam serba tekstual sebagaimana tuntunan syariat. Sifat doktriner ditunjukkan dengan mempraktikkan Islam serba mutlak dan kaku, sehingga menolak cara-cara penafsiran lain selain tertera dalam teks Quran dan Hadist. Hal ini membuat gagasan demokrasi, liberalisme, sosialisme, sekulerisme, dan ideologi lainnya diklaim sebagai doktrin "sistem kufur". Sementara sifat militan ditampilkan dengan menunjukkan sikap keagamaan yang bersemangat tinggi sehingga memposisikan orang lain baik sesama muslim maupun non muslim sebagai munafik, murtad, dan kufur. Dengan ketiga karakteristik itu, Nashir menunjukkan bahwa telah terjadi dialektika reproduksi dalam ranah ideologis antara pemurnian agama dan kenyataan hidup yang kompleks. Artinya, perkembangan gerakan Islam ideologis tersebut kelompok Islam mempunyai nasab ideologis dengan gerakan salafiyah yang muncul abad ke 20, meski mengalami corak gerakan yang berbeda. Intinya, gerakan Islam ideologis abad ke 21 menuju muara yang sama: menegakkan "*Islamic state*" melalui jalur formal seperti jalur politik di parlemen dan perda syariat di seluruh wilayah tanah air.

Selain itu yang dilakukan oleh Abdul Aziz dkk.[7] dengan memfokuskan pada lima gerakan Islam yaitu, gerakan Islam Jama'ah, gerakan Islam Isa Bugis, gerakan Jama'ah Islam Qur'ani, gerakan kaum muda Islam masjid Salman dan gerakan kelompok Islam di Yogyakarta. Ada empat faktor yang melatarbelakangi munculnya gerakan-gerakan ini; (1) pandangan tentang pemurnian, (2) sikap *establishment* keagamaan, (3) pandangan sistem yang diidealisasikan dan (4) sikap terhadap pengaruh Barat.

[7]Penelitian ini telah diterbitkan dalam Abdul Aziz dkk., *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989).

Penelitian terhadap gerakan Islam radikal yang marak muncul di era reformasi dilakukan oleh Khamami Zada.[8] Gerakan Islam radikal yang dimaksud yaitu Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) dan komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI). Khamami Zada mendekripsikan pemikiran politik gerakan Islam radikal yang meliputi relasi Islam dan negara, Islam dan demokrasi, negara Islam, syariat Islam dan presiden wanita. Di samping itu dijelaskan pula agenda-agenda dari masing-masing gerakan Islam radikal tersebut yang meliputi piagam Jakarta, pemberantasan tempat-tempat maksiat, konflik agama dan solidaritas dunia Islam.

Zaenuddin Fananie dkk.[9] melakukan penelitian terhadap gerakan Islam yang mereka sebut dengan Kelompok Radikal Keagamaan (KRK) yang tumbuh subur di Surakarta pasca reformasi. Kesembilan KRK tersebut adalah Majlis Ta'lim al-Islah, Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), Brigade Hizbullah, Barisan Bismillah, KAMMI, GPK, Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Jundullah dan Laskar Jihad. Penelitian ini memiliki dua fokus objek kajian, objek penelitian yang pertama difokuskan pada kesembilan KRK yang meliputi eksistensi mereka yang berkaitan dengan latar belakang, jumlah, keterkaitan dengan organisasi lain, visi, misi, karakteristik dan aktivitas mereka. Sedangkan objek kajian yang kedua, difokuskan pada pandangan masyarakat terhadap keberadaan mereka dan harapan masyarakat terhadap peran serta KRK dalam perubahan sosial.

Penelitian yang sangat monumental tentang gerakan Islam dalam rentang waktu klasik, tengah, maupun kontemporer dalam hubungannya dengan realitas sosial politik dan kultural dilakukan oleh SR-Ins (Siyasa Research Institut) dengan Agus Maftuh sebagai direkturnya. Penelitian ini kemudian diterbitkan dalam bentuk ensiklopedi dengan judul *Negara Tuhan, The Thematic Enctclopaedia.* Meskipun penelitian ini mengkaji

[8]Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju)

[9]Zaenuddin Fananie, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial* (Surakarta:: Muhammadiyah University Press, 2002).

berbagai gerakan Islam radikal di dunia, namun lebih banyak menyoroti gerakan al- Qa'idah dan al-Jama'ah al-Islam (JI).[10]

Selain itu, hasil penelitian yang dibukukan dalam buku *Ilusi Negara Islam*. penelitian yang terdapat dalam buku tersebut membahas ekspansi gerakan transnasional muncul ke Indonesia. Buku tersebut mengambarkan bagaimana keterkaitan agenda dan strategi gerakan/ kelompok garis keras di Indonesia., dengan gerakan Ikhwanul Muslimin-Wahabi di Timur Tengah.[11]

Berdasarkan beberapa tinjauan studi terdahulu peneliti belum menemukan kajian-kajian yang secara spesifik membahas polarisasi perspektif HTI dalam memahami ideologi Pancasila dan NKRI di Perguruan Tinggi Jember pascadibubarkannya HTI oleh negara.

F. Kajian Teori; Sosiologi (Interaksionisme Simbolik)

Dalam keilmuan sosiologi terdapat beberapa perbedaan paradigma, utamanya pada dimensi obyek kajian atau *what is the subject matter of sociology*. Dengan adanya perbedaan pandangan ini, Geoger Ritzer menilai bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempunyai beberapa paradigma (*multiple paradigm*). Setiap paradigma memiliki obyek kajian, teori, metode analisa yang berbeda. Meskipun masih banyak terjadi perdebatan penggolongan paradigma dalam ilmu sosiologi, namun menurut George Ritzer,[12] secara garis besar ada tiga paradigma yang mendominasi dalam keilmuan sosiologi, yakni pertama, paradigma fakta sosial dengan didukung beberapa teori yaitu teroi fungsionalisme struktural, dan teori konflik.

Kedua, paradigma definisi sosial dengan didukung beberapa teori yaitu teori aksi, teori interaksionisme simbolik, teori fenomenologi, dan teori etnometodologi. Ketiga, paradigma perilaku sosial dengan didukung teori *behavioral sociology* yang merupakan implementasi dari perpaduan obyek

[10]A. Maftuh Abegebriel dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta: SR-Ins, 2004).

[11]KH. Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).

[12]George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 697.

kajian psikologi perilaku ke dalam sosiologi, dan didukung oleh teori pertukaran (*exchange*). Di samping itu terdapat pula paradigma integratif atau multi paradigma yang dapat juga dikatakan sebagai paradigma "jalan tengah". Paradigma integratif ini berusaha menawarkan perpaduan berbagai paradigma sesuai dengan tingkat kebutuhan analisis dari ilmuwan sosial tersebut. Paradigma integratif ini didukung oleh teori konstruksi sosial dan teori strukturasi.

Dalam penelitian "Polarisasi Pandangan Aktivis HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Lingkungan Perguruan Tinggi Jember terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pascapenetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017", peneliti menggunakan paradigma definisi sosial yang lebih mengarah pada teori interaksionisme simbolik. Suwardi Endraswara berpendapat interaksionisme simbolik adalah salah satu model penelitian budaya yang berusaha mengungkap realitas perilaku manusia. Falsafah dasar interaksionisme simbolik adalah fenomenologi. Namun, dibanding penelitian naturalistik dan etnografi yang juga memanfaatkan fenomenologi, interaksionisme simbolik memiliki paradigma penelitian tersendiri. Model penelitian ini pun mulai bergeser dari awalnya, jika semula lebih mendasarkan pada interaksi kultural antar personal, sekarang telah berhubungan dengan aspek masyarakat dan atau kelompok. Karena itu bukan mustahil kalau awalnya lebih banyak dimanfaatkan oleh penelitian sosial, namun selanjutnya juga diminati oleh peneliti budaya.[13] Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami budaya lewat perilaku manusia yang terpantul dalam komunikasi. Interaksi simbolik lebih menekankan pada makna interaksi budaya sebuah komunitas. Makna esensial akan tercermin melalui komunikasi budaya antar warga setempat. Pada saat berkomunikasi jelas banyak menampilkan simbol yang bermakna, karenanya tugas peneliti menemukan makna tersebut.

Blomer mengemukakan ada beberapa premis interaksionisme simbolik yang perlu dipahami peneliti budaya. Pertama, manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang diberikan oleh berbagai hal itu kepada mereka.

[13]Suwardi Endraswara, "Interaksionisme Simbolik, Grounded Theory, & Cross Cultural Studies", *Metodologi Riset Budaya* (Yogyakarta: UGM Press, 2012), 1.

Misalkan, para polisi, mobil polisi, penjual minum, tipe orang, dan sebagainya dalam suatu kerumunan memiliki simbol yang bermakna khusus. Kedua, dasar interaksionisme simbolik adalah makna berbagai hal itu berasal dari, atau muncul dari interaksi sosial seorang dengan orang lain. Ideologi sebagai suatu sistem makna yang dimiliki bersama, dipelajari, diperbaiki, dipertahankan, dan didefinisikan dalam konteks orang yang berinteraksi. Ketiga, dari interaksionisme simbolik bahwa makna ditangani atau dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh orang dalam kaitannya dengan berbagai hal yang dia hadapi. Seorang polisi juga menggunakan suatu kevakinan untuk menginterpretasikan situasi.[14]

Di samping tiga premis tersebut, Muhadjir menambahkan lagi tujuh proposisi. Tujuh proposisi tersebut terkait dengan para tokoh-tokoh penemu pendahulunya. Pertama, perilaku manusia itu mempunyai makna di balik yang menggejala. Kedua, pemaknaan kemanusiaan perlu dicari sumbernya ke dalam interaksi sosial. Ketiga, komunitas manusia itu merupakan proses yang berkembang holistik, tak terpisah, tidak linier, dan tidak terduga. Keempat, pemaknaan berlaku menurut penafsiran fenomenologi, yaitu sejalan dengan tujuan, maksud, dan bukan berdasarkan mekanik. Kelima, konsep mental manusia berkembang secara dialektik. Keenam, perilaku manusia itu wajar, konstruktif, dan kreatif, bukan elementer-reaktif. Ketujuh, perlu menggunakan metode introspeksi simpatetik, menekankan pendekatan intuitif untuk menangkap makna.[15]

Demikian pula dalam penelitian "Polarisasi Pandangan Aktivis HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Lingkungan Perguruan Tinggi Jember terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pascapenetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ", peneliti berupaya mengungkap makna yang ditangkap oleh masyarakat pendukung ideologi tersebut. Pertama, dalam setiap langkah, individu maupun kelompok melakukan suatu perbuatan yang memiliki makna di balik yang terungkap, begitu pula dalam polarisasi ideologi Pancasila dan

[14]James P. Spradley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 7.
[15]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 184-185.

NKRI bagi aktivis HTI, tindakan dan perilaku masyarakat tersebut dengan menggunakan berbagai media, jargon-jargon yang diusungnya, kesemuanya memiliki makna.

Kedua, bahwa makna dari berbagai hal yang muncul ke permukaan diakibatkan adanya interaksi sosial dengan orang lain atau sekelilingnya. Dalam polarisasi ideologi tersebut berbagai makna yang muncul, mulai dari pemaknaan ideologi, sampai pada simbol-simbol yang mereka usung, semua itu akibat adanya interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Ketiga, makna yang sudah muncul akan terus berkembang dan dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran sesuai dengan yang digunakan oleh orang dalam kaitannya dengan berbagai hal yang dia hadapi. Demikian pula ketika terjadinya polarisasi ideologi yang dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya, pemaknaan terhadap ideologi tersebut terus disempurnakan sesuai dengan keadaan yang berkembang saat ini.

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), dengan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau narasumber pilihan[16] yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi Jember, yaitu: Universitas Negeri Jember (UNEJ), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, dan Univertsitas Muhammadiyah (UNMUH) Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif kualitatif sesuai objek yang diamati dengan menggunakan desain penelitian eksploratif untuk menggambarkan objek penelitian dalam upaya menggali, mengembangkan, dan menganalisis berbagai informasi yang berkait dengan HTI dengan Pancasila dan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tahapan Penelitian

[16]Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap jalan penelitian sebagaimana berikut.

Tahap pertama, meliputi:

a) Pengumpulan data sesuai lingkup penelitian

b) Pembuatan kategori data

Tahap kedua, meliputi:

a) Klasifikasi data

b) Analisis data

Tahap ketiga, meliputi:

a) Penyusunan draft hasil penelitian

b) Penyusunan laporan hasil penelitian

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui *deep interview* dengan berbagai pihak yang menjadi objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dihasilkan melalui wawancara secara langsung dan mendalam dengan objek penelitian dan informan yang telah memahami keberadaan HTI. Sedangkan sumber data sekunder, meliputi berbagi referensi yang menjadi rujukan bagi tema yang telah diangkat.

4. Analisis Hasil

Penelitian ini melakukan analisis data sejak awal penelitian sampai akhir penelitian, atau selama penelitian berlangsung, dan penelitian ini bukan menguji hipotesis yang berdasarkan teori-teori tertentu, tetapi untuk membangun atau untuk menemukan teori yang berdasarkan pada data.[17] Seluruh data yang diperoleh sepanjang proses penelitian dianalisis dengan menggunakan unsur-unsur metodis berikut ini:

a) **Interpretasi.** Unsur metodis ini digunakan untuk menafsirkan dengan jalan menyelami dan menangkap arti serta nuansa khas yang

[17]Lihat S. Nasution dan Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Disertsi, Skripsi, dan Makalah (Bandung: Jemmars, 1989), 9-11, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4-7. Haris Supratno, "Wayang Sasak Lakon Dewi Rengganis dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Lombok: Kajian Sosiologi Kesenian" (Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 1996), 102-103, dan Sunarto, *Dasar-dasar dan Konsep Penelitian* (Surabaya: Program Pascasarjana IKIP Surabaya, 1997), 36-39.

terkandung dalam pandangan pengikut HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Perguruan Tinggi Jember berkait dengan pemahaman mereka atas ideologi Pancasila dan NKRI Pasca Penetapan Perppu N0. 2 Tahun 2017. Melalui unsur metodis ini pula diupayakan mencari alternatif penyelesaian persoalan (*problem solving*) dengan cara mencari hubungan atau lingkaran pemikiran aktivis HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Perguruan Tinggi Jember berkait sehingga dicapai kebenaran otentik tentang polarisasi pandangan pengikut HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Perguruan Tinggi Jember dalam memahami ideologi Pancasila dan NKRI pasca penetapan Perppu N0. 2 Tahun 2017.[18]

b) **Kesinambungan historis**. Unsur metodis ini digunakan untuk melihat benang merah mengenai polarisasi pandangan pengikut HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Perguruan Tinggi Jember dalam memahami ideologi Pancasila dan NKRI pasca penetapan Perppu N0. 2 Tahun 2017[19].

c) **Heuristika**. Unsur metodis ini digunakan untuk menemukan jalan baru atau alternatif bagi upaya pemecahan masalah sehingga terbuka pemahaman atau pengertian baru tentang polarisasi pandangan aktivis HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Perguruan Tinggi Jember dalam memahami ideologi Pancasila dan NKRI pasca penetapan Perppu N0. 2 Tahun.[20]

5. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik, atau disebut juga paradigma definisi sosial dengan tujuan memahami (*understanding*) makna perilaku, simbol-simbol, dan fenomena-fenomena.[21] Fungsi paradigma dan teori dalam penelitian ini bukan dalam rangka membentuk fakta, melakukan prediksi, menunjukkan hubungan dua variabel

[18] Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta Kanisius), 43 dan 63.
[19] *Ibid.* 64.
[20] *Ibid.* 65.
[21] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 93.

sebagaimana penelitian kualitatif, melainkan lebih banyak untuk mengembangkan konsep dan untuk mengembangkan pemahaman serta kepekaan peneliti,[22] sehingga arahnya dapat dihasilkan pemaparan yang jelas dalam penelitian.

Sebagaimana yang didapati dalam pendapat Taylor dan Bogdan bahwa, *qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data: people's own written or spoken words and observable behavior* (metodologi kualitatif mengacu kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati).[23] Dengan kata lain bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[24] Peneliti sebagai instrumen penelitian mengadakan pengamatan, wawancara dan pencatatan langsung di lapangan, data-data yang akan dikumpulkan mayoritas data deskriptif, tidak mengutamakan angka-angka atau statistik, tetapi tidak menolak data kuantitatif. Penelitian ini mengutamakan proses dari pada produk dengan mencoba mendeskripsikan dan memahami pandangan aktivis HTI terhadap ideologi Pancasila dan NKRI pasca penetapan Perppu No. 2 tahun 2017. Di samping itu, penelitian ini mengutamakan data langsung dari lapangan. Penelitian ini menggunakan pandangan *emic*, yaitu mementingkan pandangan informan dalam memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya.

---

[22]Ibid.

[23]J. Taylor dan Steven Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings* (New York: John Wiley dan Son Inc., 1984), 5.

[24]Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 6.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
HIZBUT TAHRIR DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. SEJARAH UMUM HIZBUT TAHRIR

Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat, yaitu dalam segala interaksi yang ada, dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri negeri Islam. Sebagaimana ditegaskan Taqiyuddin al-Nabhani bahwa perjuangan Hizbut Tahrir adalah menentang penjajahan segala bentuk dan istilahnya, untuk membebaskan umat dari hegemoni imperialis dan kepemimpinan ideologi penjajah hingga ke akar- akarnya, baik aspek budaya, politik, militer, pendidikan, ekonomi dan segala aspek kehidupan umat, serta mengusir apapun bentuk penjajahan dari tanah air kaum muslimin.[1]

Melacak dari awal sejarah berdirinya Hizbut Tahrir tahun 1953 di Al-Quds Palestina, organisasi ini memiliki cita-cita besar, yakni melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, Hizbut Tahrir berpendirian harus dilakukan melalui negara, dalam hal ini Hizbut Tahrir menekankan pada Daulah Islamiyah atau daulah khilafah yang dipimpin oleh seorang khilafah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Khilafah tersebut harus dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad.[2] Kemajuan umat Islam harus diraih dengan pencerahan dan pencerdasan. Karena itu Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan kemuliaan dulu.

Tujuan gerakan Hizbut Tahrir sebagai gerakan dakwah politik dapat dilihat dalam tiga aspek. *Pertama*, pada aspek doktrin Islam, Hizbut Tahrir ingin melangsungkan kembali kehidupan Islam dalam segala aspek kehidupan. Hizbut Tahrir berupaya untuk merekonstruksi dan mereorientasi umat Islam yang telah meninggalkan nilai-nilai filosofis Alquran dalam hidupnya, untuk kembali menjadikan Alquran sebagai pedoman

---

[1] Taqiyuddin Al-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam* [Terj.] (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 1993), 72.
[2] Taqiyuddin Al-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam* [Terj.] (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2000), 20.

hidup dalam menjalankan segala aktivitasnya. Di mana seluruh gerak dan langkahnya berada dalam aturan hukum dan undang- undang syar'i. Karena hanya dengan hukum syar'i umat Islam akan mampu meraih kembali kejayaan dan kemenangannya di dunia serta keselamatan di akhirat.

Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dan melaksanakan ajaran Islam secara kaffah dalam segala dimensinya dengan berpedoman kepada Alquran dan sunnah Nabi, bukan hanya dalam masalah-masalah ritual-simbolik keagamaan seperti shalat, puasa dan haji, tetapi juga meliputi aspek ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan. Demi terealisasinya ajaran Islam di segala dimensi kehidupan umat manusia, Hizbut Tahrir memutlakkan adanya kekuasaan dan patron negara. Dan bagi Hizbut Tahrir satu-satunya sistem pemerintahan sebagai jalan tol menuju terlaksananya ajaran Islam kaffah adalah negara Islam dengan sistem Khilafah.

Tampaknya, Khilafah bagi Hizbut Tahrir merupakan agenda penting yang harus diwujudkan sebagai jaminan legitimasi kekuasaan dan patron tercapainya tujuan utama gerakan dan perjuangan Hizbut Tahrir, yaitu khilafah sebagai pemerintahan yang menjalankan wewenang kekuasaan dalam mengatur kehidupan sebagai pemberi jaminan formal dan legal menuju teraplikasinya syari'at Islam.

Kedua, pada aspek sosial politik, membebaskan umat Islam dari segala bentuk imperialisme, baik secara fisik dan materi maupun pemikiran dan doktrin. Hizbut Tahrir merupakan wadah perjuangan kolektif yang terorganisir melakukan perlawanan-perlawanan dengan mengungkap kebusukan imperialisme Barat dan imbas yang diakibatkan kepada kaum muslimin, Hizbut Tahrir melakukan aksi pemahaman dan penyadaran untuk kembali kepada Islam, sebagai ikatan ideologi untuk memperkuat barisan umat Islam melawan penjajahan.

Ketiga, pada aspek dakwah, menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia termasuk kepada non-Islam, karena Islam adalah agama langit yang *rahmatan lilalamin* diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia dari segala bentuk kerusakannya.

Gerakan dakwah Hizbut Tahrir dibangun di atas komitmen pembebasan umat melalui kegiatan dan aktivitas yang bersifat politik. Maksud kegiatan yang bersifat politik adalah urusan- urusan masyarakat harus diperhatikan sesuai dengan timbangan hukum-

hukum dan pemecahan secara syar'i. Karena politik adalah mengurus dan memelihara urusan umat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya berdasarkan nilai-nilai filosofis ajaran Alquran dan sunnah nabi.[3]

Operasionalisasi kegiatan ini tampak jelas dalam bentuk mendidik dan membina umat dengan *tsaqafah* (kebudayaan) Islam, melebur umat dengan Islam, membebaskan umat dari aqidah yang rusak, pemikiran yang salah, persepsi yang keliru dan membebaskannya dari pengaruh ide-ide, pemikiran dan pandangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan aktifitas ini diharapkan terjadi perubahan yang mencakup tiga hal: pertama, perubahan pola pikir dan ide-ide masyarakat (*fikrah*). Kedua, perubahan perasaan yang dimiliki anggota masyarakat. Ketiga, perubahan sistem (hubungan/ interaksi) yang ada di dalam masyarakat.[4] Adanya perubahan pola pikir dan pemahaman inilah yang menentukan bentuk perasaan yang mendorongnya serta bentuk mekanisme tindakannya. Berdasarkan pemahaman dan perasaan tersebut, individu dan masyarakat akan merubah pola pandang mereka terhadap suatu kemaslahatan dan mengatur kemaslahatannya sehingga hubungannya dengan pihak lain dibentuk berdasarkan pemikiran, perasaan dan sistem yang diterapkan dan dimilikinya.[5]

Aktivitas politiknya juga meliputi perjuangan menentang imperialisme untuk membebaskan umat dari belenggu hegemoni dan cengkraman pengaruhnya. Serta kegiatan dan perjuangan politik dengan melancarkan kritikan, kontrol dan koreksi terhadap penguasa. Menentang para penguasa yang bersekongkol dengan Barat-imperialis dan mengungkapkan pengkhianatannya terhadap umat. Semuanya itu dilakukan secara damai tanpa cara-cara kekerasan (fisik/senjata) sesuai jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah.[6]

Aktivitas yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa aktivitas Hizbut Tahrir merupakan aktivitas yang bersifat politik, bukan kegiatan yang bersifat sosial dan kerohanian. Aktivitas politik ini dilakukan sebagai pembebasan umat Islam dari lingkaran abu-abu. Hizbut Tahrir mendidik dan membina umat bukan dalam bentuk nasihat dan petunjuk-petunjuk, akan tetapi mendidik dengan pergolakan pemikiran. Masyarakat

[3]Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizb At Tahrir Partai Politik Islam Ideologis.* (www.al –Islam.or.id.,2003),5.
[4]Abdul Oadim Zallum. *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al Azhar Press. tt.). 24-25.
[5]Taqyuddin Al-nabhani, *Negara Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2000). 7.
[6]Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizb At Tahrir Partai Politik Islam Ideologis.* (www.al –Islam.or.id.,2003), 6-7.

disadarkan dengan pergolakan pemikiran melalui penentangan terhadap ide-ide, aturan dan aqidah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis Alquran dengan cara menjelaskan kerusakan yang dimilikinya dan dampak negatif yang ditimbulkan dan pemikiran westernis-sekularis yang telah mewabah di tengah masyarakat muslim.

Aktivitas yang sangat menitik beratkan pada pergolakan politik yang tidak memberikan perhatian utama pada akhlak, sebab akhlak dipandang sebagai bagian dari hukum syara" yang seharusnya setiap individu muslim menghiasi dirinya dengan akhlak mulia dan menanggalkan akhlak yang tercela dari dalam dirinya sebagai konsekuensi dari peleburan diri mereka dengan Islam, dan bukan penyebab kebangkitan dan keruntuhan umat. Oleh karena itu Hizbut Tahrir berjuang membina dan mendidik umat dengan *tsaqafah* islamiyah dengan prioritas utamanya adalah pemikiran politik, karena bagi Hizbut Tahrir tidak ada wadah dan strategi perjuangan dalam Islam yang paling tepat kecuali pergolakan pemikiran politik dan organisasi politik.

Prioritas pada kerja-kerja politik dan tidak mengutamakan aspek akhlak (bukan berarti mengabaikannya) memiliki korelasi kuat dengan tujuan Hizbut Tahrir sendiri yang ingin mendirikan negara Islam sebagai patron dalam mengatur semua tata laksana kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang sesungguhnya dengan syariat Islam. Yaitu masyarakat yang terbentuk dan terbina bukan karena akhlaknya, tetapi terdiri dari empat komponen yang paling mengikat, individu, pemikiran atau ide-ide, perasaan dan peraturan berdasarkan syariat Islam, sebab itu politik sebagai jalannya.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan politik Hizbut Tahrir meliputi; pertama mendidik dan membina umat dengan *tsaqafah* Islam. Kedua, menggelindingkan pertarungan pemikiran. Ketiga, perlawanan menentang Barat-imperialistis. Keempat, mengontrol, mengkritik dan menentang penguasa yang mengkhianati amanat umat.

Mencermati apa yang telah dilakukan Hizbut Tahrir dalam proses pembentukan dan mengokohkan keberadaannya sebagai gerakan Islam Ideologis maka dapat diperoleh suatu gambaran bahwa Hizbut Tahrir merupakan suatu gerakan Islam yang lahir dari suatu fenomena yang memiliki kesinambungan dengan sejarah panjang umat Islam di satu pihak dan perubahan sosial yang dialaminya di pihak lain. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ernest Gellner. Hal ini dapat dijelaskan dari kondisi umat Islam pada

saat kelahiran Hizbut Tahrir yaitu kondisi keterpurukan kaum muslimin akibat mereka meninggalkan hukum Islam dan mulai menerapkan hukum kufur.

Kondisi ini terjadi terutama setelah daulah khilafah Utsmaniyah diruntuhkan oleh kaum kafir dengan bantuan Mustafa Kemal Attaturk yang dianggap dunia sebagai bapak pembaharuan Turki. Keruntuhan daulah khilafah ini kemudian disikapi oleh kaum muslimin dengan upaya yang tiada henti untuk mengembalikan daulah hanya saja upaya-upaya tersebut karena beberapa sebab tidak berhasil. Bercermin dan belajar dari upaya-upaya inilah kemudian Hizbut Tahrir lahir sebagai suatu partai ideologis Islami.[7] Dari sini tepatlah penolakan yang disampaikan oleh Gellner terhadap pandangan yang menyatakan bahwa gerakan Islam hanya sebagai reaksi terhadap tantangan modernitas.

Dapat ditegaskan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh Hizbut Tahrir memiliki potensi besar untuk memberikan dampak gerakan terhadap masyarakat luas dan terutama perannya dalam menciptakan transformasi struktural dengan syarat setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas Hizbut Tahrir memahami betul apa yang harus mereka lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan yang digariskan oleh Hizbut Tahrir.

B. Gagasan Hizbut Tahrir

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, kekuatan kekuatan Islam harus membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan dalam berbagai dimensi kehidupan, rnembebaskan umat dari pemikiran-pemikiran dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara sekuler. Negara-negara di dunia, termasuk Islam, tengah mempraktikkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang menurut pandangan Hizbut Tahrir sudah jauh dari misi Islam. Artinya negara-negara muslim sudah banyak meniru pola kehidupan masyarakat Barat yang tidak Islami dan mengadopsi sistem hukum yang tidak bersumber dari Islam. Kondisi semacam inilah yang menurut Hizbut Tahrir harus diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan Islam agar pemerintahan dikendalikan dengan sistem hukum Islam dan menentang segala bentuk perundang-undangan serta pikiran-pikiran yang kufur.

Dengan menolak segala macam hegemoni Barat, Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah

[7]Taqiyuddin Al-Nabbani, *Pembentukan Partai Politik Islam* (Terj.) (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah),10-25.

dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang hanya berasal dari Islam.[8] Segala sesuatu yang tidak berasal dari Islam bukan merupakan bagian dari setiap sikap dan pandangan Hizbut Tahrir. Seluruh gagasan yang muncul dari Hizbut Tahrir hanya bersumber dari Islam. sesuatu yang tidak Islami pasti tidak laku dan tidak menjadi pedoman dalam Hizbut Tahrir. Pendirian Hizbut Tahrir yang tegas ini merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari gerakan politik dan cita-cita untuk mendirikan khilafah Islamiyah, yakni kepemimpinan tunggal umat Islam, setelah khilafah Islamiyah di Turki Ustmani dihancurkan oleh kekuatan kapitalisme Barat.

Untuk mewujudkan ide-ide, gagasan dan pandangannya, Hizbut Tahrir menempuh cara-cara politik dan tidak dengan cara yang lain. Cara politik efektif untuk mencapai tujuan terbentuknya khilafah Islamiyah. Sasaran utama dari jalan yang ditempuh ini merupakan usaha untuk mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat agar mereka menerima, mengamalkan dan turut mengembangkannya agar bisa segera terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan. Tugas tersebut merupakan kewajiban setiap muslimin baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana kewajiban yang sama telah dilaksanakan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. Tugas tersebut juga merupakan tugas bersama kaum muslimin di seluruh dunia.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam merupakan ideologi bagi negara, bagi masyarakat dan bagi kehidupan uinat manusia. Islam adalah bagian integral yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam juga telah memerintahkan untuk mendirikan suatu negara dan pemerintahannya dan memerintah dengan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang tidak bersumber pada Islam. Alquran telah menegaskan dalam QS. an-Nisa (4): 59 "Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin di antara kalian). Dan mengenai penegakan hukum, QS. al-Maidah (5): 48, memberi pedoman untuk memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan. Ayat ini telah jelas mengenai ketentuan Islam tentang pemerintahan dan proses penyelenggaraannya.

Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik

[8] Ahmad Aru Patria. *Gerakan Hizbut Tahrirut Tahrir: Kajian Tentang Ideologi dan Perjuangan Politik dalam Upaya Mendirikan Daulah Islamiyah,* (Yogyakarta: Skripsi UPN, 2003), hlm. 115. Hizbut Tahrirut Tahrir, Op.Cit. hlm. 29.

yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tablig akbar dan demonstrasi. Dua hal ini merupakan cara Hizbut Tahrir menyuarakan gagasan politik Islamnya. Menurut salah seorang pengurusnya, Hizbut Tahrir tidak akan menjadi partai politik untuk saat ini di Indonesia, tetapi akan berjuang secara ekstra parlementer. Kelembagaan politik Indonesia menurutnya menyulitkan sekaligus tidak efektif bagi Hizbut Tahrir untuk memperjuangkan gagasan khilafah Islamiyah, bahkan muncul "ketakutan" akan terjerumus ke dalam kepentingan-kepentingan politik sesaat yang justru akan mengurangi bobot perjuangan Islam di masa depan.

Konsep pemerintahan Islam akan terus diperjuangkan meski saat ini masih bersifat ekstra parlementer dengan menggelar seminar dialog, diskusi, tablig akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum. Gerakan ini tidak bersifat lokal tetapi menyebar ke seluruh belahan dunia. Pendiri jama'ah Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani telah meninggalkan beberapa konsep pemerintahan Islam yang oleh pengikutnya akan terus diperjuangkan hingga terealisasi. Hizbut Tahrir Indonesia masih memprioritaskan pembinaan jama'ah, menurut salah seorang yang aktif dalam Hizbut Tahrir, suatu saat Hizbut Tahrir Indonesia akan menjadi kekuatan politik resmi untuk dapat memperjuangkan cita-cita politiknya.

Hizbut Tahrir merupakan fenomena baru yang menarik untuk dikaji, mengingat gagasan dan praksisnya berbeda dengan kebanyakan jama'ah lain yang pernah ada di Indonesia. Disebut demikian, karena agenda-agenda politik yang diperjuangkan oleh jama'ah ini berdasarkan tradisi Islam periode awal sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi, Khulafaurrasyidin, khilafah dalam dinasti Muawiyyah dan Abbasyiyah hingga khilafah Turki Ustmani yang ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Attaturk pada 1924. Jama'ah ini meletakkan dasar perjuangan pada Alquran dan sunnah Nabi seperti juga jama'ah-jama'ah Islam lainnya. Untuk membangkitkan, menyadarkan, mendidik umat serta menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, Hizbut Tahrir harus merujuk sepenuhnya kepada Alquran dan sunnah, apalagi untuk memperjuangkan terbentuknya daulah Islamiyah.

Bagi Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan Islam merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena Nabi telah berhasil menegakkan Islam dan memperluas pengaruhnya selama lebih kurang sepuluh tahun di Madinah dan pada masa

itu umat Islam telah banyak dan wilayah kekuasaan Nabi yang berpusat di Madinah[9] telah meluas dan hampir mencakup seluruh jazirah Arabia. Bangunan Kota Madinah dilandasi oleh tiga pilar yaitu pemikiran (*fikriyah*), politik (*siyasiyah*) dan tanpa kekerasan (*la maadiyah*).[10] Keberhasilan Rasulullah membangun umat di atas pluralisme agama di Madinah merupakan representasi konkrit betapa Islam dapat memberikan alternatif yang paling aman, damai bagi seluruh umat manusia.

C. Upaya Sistematis Hizbut Tahrir Membangun Masyarakat Islami

Hizbut Tahrir melakukan berbagai upaya yang sistematis bagi terlaksananya sebuah kehidupan masyarakat yang lebih Islami, dan upaya tersebut akan tercapai bila didukung oleh sumber daya manusia yang Islami dan memahami arah perjuangan Islam secara baik. Karena itu dibutuhkan metode atau cara yang lebih baik dalam mencapai target dan tujuan Hizbut Tahrir. Dengan cara seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para ulil amri sebelumnya yang menekankan pada pembinaan dan pengaderan akan memperoleh hasil yang diinginkan meski tidak bersifat instan.

Hizbut Tahrir dalam rangka mengoperasionalkan gagasan idealnya menggunakan tiga tahap;[11] a) Tahapan *tsaqif* (pembinaan dan pengaderan) untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. b) Tahapan *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat agar mampu mengembangkan dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan. c) Tahapan *Istilamiil Hukmi*

---

[9]Selama lebih dari sepuluh tahun (+ 13 tahun) di Mekah Ra-sulullah Muhammad saw berjuang untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat Mekah, namun dakwah tersebut tidak mem-berikan hasil yang memuaskan. Dengan petunjuk dari Allah SWT, Nabi melakukan perjalanan (hijrah) dengan para sahabat dari Mekah menuju Yastrib (+ 400 KM arah utara Mekah), sebelum sampai di Yastrib Nabi beserta sahabat-Nya disambut oleh putra-putri de-ngan suara merdu melagukan nyanyian selamat datang:Thlma' al badru 'alaina - bulan purnama telah menjelma Min tsamyyaatil wadaa'i - menerima dakwah Islam Wajaba Syukru 'alaina - dari celah-celah barisan bukit Maada aalillahi daa'i - wahai utusan pendatang kami Aiyuh al mab'uustu fiina - keharusan bersyukur bagi kita Ji'ta bil Amril muthaa'i - Tuan membawa perintah Ilahi Sesampainya di Yastrib pada sore hari Jum'at tanggal 16 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah (20 September 622 M) Nabi per-tama-tama mendirikan Masjid sebagai pusat segala kegiatan ter masuk untuk ekonomi, politik dan masalah umat lainnya. Masjid menjadi markas besar untuk urusan pemerintahan yang baru di-proklamirkan sekaligus rnenjadi tempat suci, rumah Allah. Segala dakwah Islarn berjalan lancar dan sukses bila dibandingkan de ngan yang dilakukan oleh Nabi di Mekah. Kota Yastrib diganti namanya menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi) dan dari kota inilah Nabi untuk pertama kalinya membuat kesepakatan dengan segala unsur yang heterogen dalam masyarakat untuk bersama-sama membangun masyarakat Madinah.

[10] Untuk uraian mengenai pola pembinaan umat yang tidak menggunakan kekerasan atau anarkis, silakan periksa Hizbut Tahrirut Tah-rir Indonesia, Dakiiiah Islam Tanpa Kekerasan (Indonesia: HTI, 2003) hlm. 3.

[11] Hizbut Tahrirut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrirut Tahrir*, (Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm. 57.

(pengambilalihan kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia.

Ketiga tahap tersebut di atas berjalan secara simultan dan gradual. Artinya tahapan pertama mendekati umat dengan memberikan pemahaman Islam yang benar menurut pandangan, pikiran dan keyakinan ideologis Hizbut Tahrir sehingga dengan memberikan pencerahan spiritual melalui pemahaman Islam yang benar ini, Hizbut Tahrir mengharapkan masyarakat tertarik dengan gerakan Hizbut Tahrir dan masuk menjadi anggota untuk memperkuat barisan gerakan Hizbut Tahrir. Pada intinya tahapan ini merupakan tahapan pembentukan ideologi dan penanaman Tauhid yang benar kepada setiap individu yang merasa tertarik dengan berbagai pandangan dan pikiran Hizbut Tahrir. Apabila seseorang telah memahami ajaran Islam berdasarkan teks-teks Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw maka sudah cukup bagi Hizbut Tahrir. Hal ini karena dengan pemahaman demikian akan rnuncul kesadaran untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Makna dari pengaderan dan pembinaan anggota dalam Hizbut Tahrir adalah pembentukan karakter dan keprbadian setiap individu muslim yang merasa berkepentingan dengan ajaran atau risalah Islam yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad saw. Dalam pola pembentukan kader Hizbut Tahrir lebih banyak memberikan perhatian kepada generasi muda yang menjadi pelanjut perjuangan dan penegakan syari'at Islam dan aqidah Islamiyah. Setelah masa pembentukan kader sudah mantap dan telah memiliki komitmen untuk bejihad menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka tahapan berikutnya yakni berinteraksi dan membangun jaringan dengan berbagai kelompok Islam lainnya yang tentu mempunyai gagasan yang sama mengenai pentingnya umat. Islam menegakkan syari'at Islam. Kekuatan Islam akan tampak ketika ada persatuan dan kesamaan pandangan dalam merumuskan agenda perjuangan umat. Berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam masyarakat, bagi Hizbut Tahrir merupakan sesuatu yang tidak saja penting tetapi merupakan keharusan bagi proses sosialisasi ajaran Islam sehingga masyarakat dapat hidup dan menerima ajaran Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Interaksi yang perlu dibangun dalam kerangka penyadaran melalui opini dan penggalangan kekuatan massa merupakan cara yang baik untuk dilakukan, karena

masyarakat muslim berada dalam bayang-bayang pengaruh dan dominasi kapitalisme-sosialisme di mana keduanya merupakan produk ideologi Barat. Kalangan Barat sedang menyebarkan peperangan terhadap kaum muslimin di belahan dunia, setelah berhasil menghancurkan Afganistan. kemudian Irak dan akan menyusul negara-negara muslim lainnya. Agresi dilakukan untuk memperbesar pengaruh dan dominasinya terhadap negara-negara kecil, terutarna negara-negara Islam yang mempunyai kekayaan alam melimpah. Pemimpin umat Islam harus membangun jaringan dan kekuatan untuk menyatukan potensi umat melawan hegemoni Barat dengan cara-cara yang rasional.

Tahapan yang paling penting bagi Hizbut Tahrir untuk memudahkan pelaksanaan syari'at Islam adalah *Istilamiil Hukmi* (pengambilalihan kekuasaan). Tingkat terakhir ini merupakan fase di mana perjuangan umat Islam sudah mencapai target yang diinginkannya, karena bagi Hizbut Tahrir ketika mencapai tingkatan ini, maka umat Islam akan dengan leluasa mengatur kehidupan umat dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bagi Hizbut Tahrir, tahapan ini merupakan proses perjuangan yang dibantu dan diberi pertolongan oleh Allah. Setelah khilafah terbentuk, maka kaum muslimin sudah mulai mensosialisasikan ide-ide, pandangan dan konsep-konsepnya berdasarkan ajaran Islam. Membangun kejayaan umat menurut pendapat Hizbut Tahrir harus berada dalam satu payung politik yakni di bawah naungan Daulah Islam, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.[12]

D. Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an dibawa oleh Abdurrahman Al Baghdadiy dan kemudian disebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bermarkas di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan sebutan DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Setiap Provinsi di Indonesia memiliki markas dengan sebutan DPD I Hizbut Tahrir Indonesia, setiap kabupaten/ kota memiliki markas dengan sebutan DPD II Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir seluruh dunia saat ini (2017) diketuai oleh Atha Abu Ar-

[12] http/ /www.al-islam.or.id.

Rasytah, sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diketuai oleh Rokhmat S. Labib. Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) baru mulai terlihat pergerakannya pada publik yaitu pada konferensi internasional tentang Khilafah Islamiyah pada tahun 2000 di Jakarta.

Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik. sesuai dengan namanya *hizb*. dapat dengan nyata menamai dirinya sebagai partai politik apabila menggunakan istilah partai politik secara luas. Contohnya menurut Budiarjo yang mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.[13] Munculnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 pasal 1 yang mendefinisikan partai politik di Indonesia sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Hal inilah yang memberikan penegasan posisi HTI sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia sampai dengan saat ini (2017). Dengan demikian, meskipun HTI menamakan dirinya sebagai suatu partai politik, tetapi di Indonesia tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan, karena HTI tidak mau mengikuti proses demokrasi melalui pemilihan umum.

Hizbut Tahrir Indonesia dapat dianggap berseberangan dengan Pancasila karena tujuan mereka adalah *Khilafah*, sehingga dapat mengubah Indonesia menjadi negara Islam yang bertentangan dengan nilai pokok Pancasila yang merupakan fondasi bagi negara dan satu-satunya ideologi yang telah ditetapkan di Indonesia. Sikap HTI yang terlihat jelas dalam publikasi-publikasi dan beberapa statement resmi oleh pimpinan-pimpinan HTI. Dalam Al-Wa'ie (87: 41) misalnya, Ismail Yusanto mengkritisi Pancasila dengan mengatakan bahwa Pancasila tidaklah cukup untuk mengatur suatu masyarakat. Ismail Yusanto berargumen bahwa Pancasila hanyalah seperangkat "nilai filosofis" yang kurang praktis yang oleh karena itu dipraktikan secara berbeda oleh Soeharto dan Soekarno. Pada 2004 dalam sidang parlemen untuk mengamandemen UUD 1945, HTI menyeru untuk kembali kepada Pancasila sebagai fondasi bagi bangsa (Al-Wa'ie, 24: 8) mereka menentang ide asas tunggal Soeharto yang hendak dimunculkan kembali.

[13] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2000), 160-161

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada peraturan konstitusi. Setiap ormas yang ada di Indonesia haruslah mendapatkan perizinan agar diakui oleh pemerintah. HTI adalah organisasi kemasyarakatan yang mendapat persetujuan dengan legalitasnya yaitu Keputusan Menkumham No. AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Kemudian HTI juga memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) yang didalamnya menjelaskan identitas keanggotaan Hizbut Tahrir di Indonesia, pada Bab II pasal 4 tentang identitas dan azas yang bunyinya "Hizbut Tahrir Indonesia adalah Gerakan Dakwah Islam berazas Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

HTI dengan tegas menolak ormasnya dikatakan sebagai ormas yang anti Pancasila, walaupun jika memang dilihat HTI tidak pernah menggunakan simbol-simbol nasionalisme, seperti bendera merah putih, burung garuda, dan lain-lain. Di dalam AD/ ART HTI (BAB II Pasal 4) HTI menyatakan bahwa ormasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. HTI memandang Pancasila dari segi peraturan tertulis dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, seperti pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama Islam karena Tuhan dalam agama Islam bersifat Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradap, maka memang seharusnya setiap manusia bersifat adil dan beradap. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memang seharusnya seluruh rakyat Indonesia bersatu tanpa memandang suku, agama, dan ras bahkan HTI memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu: menyatukan seluruh umat manusia dibawah sistem *khilafah*, sebagaimana yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sejak Daulah Islam hingga berakhir pada 3 Maret 1923 di Turki, pada waktu itu tidak ada istilah *nation state* atau negara-negara sehingga tidak terkotak-kotak seperti saat ini, bahkan ketika kasus Timor Leste, Aceh, kemudian saat ini Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, HTI adalah ormas yang paling banyak menolak dan menyuarakan ini, hal ini merupakan perbuatan *ashobia* yang dilarang di dalam Islam. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, memang ini yang seharusnya diterapkan yaitu dengan lebih mengutamakan musyawarah dari pada voting, saat ini kita justru lebih bangga dengan demokrasi yang

mana menerapkan sistem *one man one vote* daripada musyawarah mufakat. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia memang sudah seharusnya bersifat adil karena itu adalah nilai-nilai keislaman.

HTI di Indonesia menjadi kontroversi sebab sebagian kalangan menganggap HTI sebagai ormas yang anti terhadap Pancasila, sedangkan Pancasila sudah bersifat final dan tidak dapat lagi untuk dirubah. HTI sama sekali tidak menunjukkan identitas nasionalismenya karena tidak pernah terlihat menggunakan simbol-simbol nasionalis bendera merah putih, burung garuda, dan lain-lain. HTI juga tidak banyak memberikan masukan mengenai Pancasila malah selalu menyuarakan *Khilafah* atau *Caliphate*, karena bagi mereka itu adalah solusi segala permasalahan yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia, baik itu masalah politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

E. Strategi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia Dan Relevansinya Dengan Sistem Dakwah Yang Digerakkan Oleh Organisasi Atau Lembaga Islam Lainnya

Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad saw merupakan agama dakwah, yakni agama yang membawa ajaran-ajaran untuk disampaikan kepada umat manusia. Konsekuensi logis dari keberadan Islam sebagai agama dakwah maka Islam membutuhkan eksistenti dan peran dakwah. Dakwah merupakan sarana vital bagi proses perkembangan dan kemajuan Islam, baik pada masa sekarang maupun di masa akan datang. Bahkan al-Faruqi menyatakan bahwa Islam tidak bisa menolak dakwah jika Islam memiliki kekuatan intelektual. Menolak dakwah berarti menolak kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan orang lain terhadap apa yang diklaim sebagai kebenaran Islam. Tidak menuntut persetujuan orang lain atau berarti menyatakan klaim itu subyektif, partikularis atau relatif secara mutlak, karena itu tidak berlaku bagi orang lain selain pembuat klaim itu sendiri.

Oleh karena itu dakwah merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam. Apalagi setelah Rasulullah wafat, kewajiban dakwah menjadi sebuah keniscayaandan menjadi doktrin ilahiah yang dinyatakan langsung di dalam Alquran surat Ali-Imran ayat 104. Bagi seorang muslim, dakwah merupakan keharusan untuk dilaksanakan. Secara historis, kehadiran dan peran dakwah senantiasa berinteraksi dengan dinamika atau perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan Rasulullah Muhammad saw, betapa kehadiran dan peran dakwah memiliki arti yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak hanya diperkenalkan dan diajarkan tentang bagaimana hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, dakwah yang dilakukan tidak terlepas dari konteks kehidupan bermasyarakat. Ajaran dakwah ini memberikan kerangka berfikir yang bersifat prinsipil dan metodologis dalam pengembangan masyarakat. Pembahasan tentang dakwah banyak memberikan bermacam-macam model dalam pengaplikasiannya.

Hizbut Tahrir dalam upaya menegakkan syari'at Islam melakukan strategi dengan tahapan yaitu tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), tahap *tafa'ul* (berintraksi) dengan umat dan tahap *istilamul hukmi* (pengambil alihan kekuasaan).[14]

Tahapan pertama, membentuk partai politik yang akan melakukan pembinaan atau pengkaderan *(Marhalah at-Tatsqif)*. Partai politik yang dibentuk akan menyiapkan kader yang faham dengan Islam serta mau berjuang demi Islam, kader-kader ini dibentuk dengan pendidikan pengajian rutin mingguan dan bulanan, yang akan menyampaikan pemikiran dan metode dakwah Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Tujuan partai adalah melanjutkan kehidupan Islam, bukan untuk mengangkat menteri, anggota parlemen, apalagi mencari kesejahteraan moral atau tujuan spiritual. Kehidupan Islam akan berlangsung jika ada yang bertanggung jawab terhadap penerapan syar'at yaitu khilafah. Perjuangan menuju khilafah harus dilakukan secara berjamaah (berkelompok).[15] Jadi bukan secara individual, sebab tidak mungkin individu-individu mampu memikul tugas amat berat tanpa bergerak bersama-sama dalam sebuah jamaah.

Secara politik, artinya perjuangan menuju khilafah hendaknya menempuh jalur politik, bukan jalur lainnya (ekonomi, sosial kemasyarakatan dan sebagainya), sebab permasalahan khilafah adalah permasalahan politik. Karena, khilafah adalah institusi politik. Dan kedua kata kunci ini, yaitu secara individual dan secara politik, akan dapat terwujud dalam sebuah partai politik. Partai politik inilah yang akan bergerak bersama umat dan di tengah umat untuk berjuang menuju tegaknya khilafah.

Pembentukan *marhalah tatsqif* ini adalah tahap pembinaan dan pengkaderan

[14]Abu Afif dan Nur Khalish, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), 32.
[15]lihat QS. Ali Imran:104.

untuk melahirkan individu-individu yang meyakini pemikiran dan metode partai politik guna membentuk kerangka gerakan, pada tahapan ini partai mulai membina orang-orang yang bersedia menjadi anggotanya dengan *tsaqafahnya*.[16]

Aktivitas hanya pada kegiatan pembinaan saja, yaitu penyampaian *tsaqafah* (materi) saja. Perhatian diutamakan untuk membentuk kerangka gerakan, memperbanyak anggota, membina meeka secara berkelompok dan intensif dalam halaqah-halaqah dengan *tsaqafah* (materi) yang telah ditentukan sehingga berhasil membentuk satu kelompok partai yang terdiri dari orang-orang yang telah menyatu dengan Islam (menerima dan mengamalkan) ide-ide partai, serta berinteraksi dengan masyarkat dan mengembangkannya ke seluruh lapisan umat.

Tahapan kedua, adalah tahap berinteraksi dengan umat dan mendorongnya untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas dasar ide-ide dan hukum- hukum Islam yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk berusaha mewujudkan dalam realita kehidupan. Bersama- sama Hizbut Tahrir, umat melakukan aktivitas untuk mendirikan *Daulah Khilafah*, mengangkat seorang Khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.[17]

Pada tahap ini Hizbut Tahrir mulai beralih mengajak kepada masyarakat banyak dengan penyampaian yang bersifat kolektif. Pada saat ini Hizbut Tahrir melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini:

a. *Tatsqif Marakkazah* (Pembinaan yang intensif)

   Tatsqif Murakkazah merupakan amal politik untuk mencetak kader-kader politik. Secara sistematis dan berkelanjutan kader-kader ini dibina oleh partai politik sehingga mereka siap dan mampu mewujudkan cita-cita partai politik. Mereka tidak hanya mampu dari segi ide (fikran), tetapi juga mampu untuk berkorban demi perjuangan partai. Hal ini merupakan aktivitas yang sangat penting dan mendasar dalam politik karena tanpa adanya kader tidak mungkin terjadi perubahan di tengah masyarakat.

   Oleh karena itu Hizbut Tahrir dalam aktivitas *tasqif murakkazah*, secara intensif melakukan proses kaderisasi dengan menanamkan aqidah Islam dan syariat Islam

[16]Taqiyuddin Al-Nabbani, *Pembentukan Partai Politik Islam* (Terj.) (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah),40.
[17]Abu Afif dan Nur Khalish, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), 35.

yang menyeluruh (komprehensif) sampai terbentuk *syakhshiyah Islamiyah* pada para kader tersebut, sehingga sebelum terjun ke masyarakat mereka sudah siap dengan solusi-solusi yang nyata untuk berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Secara praktis aktivitas ini dilakukan melalui halaqah- halaqah (kelompok kecil yang terdiri dari dari beberapa orang) di mana dalam halaqah ini secara sistematis dan terarah dilakukan pengkajian terhadap ide-ide Islam dari kitab-kitab yang diadopsi oleh partai.[18]

b. *Tatsqif Jama'iyah* (Pembinaan Kolektif/ Umum)

Tatsqif Jama'iyah dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan syariah Islam secara kaffah oleh Daulah Khilafah Islam. Hal ini dilakukan dengan cara membina umat dengan *tsaqafah* Islam (pemikiran Islam), meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari aqidah rusak, pemikiran salah, serta pandangan-pandangan kufur. Aktivitas ini sangat penting karena tidak akan terjadi perubahan mendasar di tengah-tengah umat kalau tidak terjadi perubahan kesadaran masyarakat. Penegakan Daulah Khilafah haruslah dilakukan melalui umat dalam pengertian didukung oleh kesadaran umat, karena yang ingin dibangun adalah pemerintahan yang didasarkan pada pemikiran yang matang (*al hukmu 'ala ala fikrah*) bukan semata mata sikap emosional sesaat.

Oleh karena itu Hizbut Tahrir sebagai partai politik yang ingin melangsungkan kembali kehidupan Islam dalam naungan *Daulah Khilafah Islamiyah* harus terjun ke masyarakat menyampaikan Islam secara kaffah dan menyeluruh. Apabila di masa Rasulullah, bentuk kekufuran yang dilakukan masyarakat adalah menyembah berhala maka sekarang yang harus dijelaskan kepada masyarakat adalah bahaya ide-ide kufur seperti kapitalisme berikut ide-ide pokoknya (sekularisme, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme dan lain lain. Dijelaskan pula kerusakan aturan-aturan kapitalisme dalam berbagai bidang yang menyengsarakan manusia. Cara praktis dalam hal ini dapat dilakukan dalam berbagai *uslub* (teknis) dan *wasail* (sarana perantara) seperti pengajian umum, khutbah jum'at, seminar, diskusi publik, debat terbuka demikian pula bisa melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah dan lainnya. Diharapkan dari aktivitas ini akan muncul kesadaran umat untuk

[18]Farid Wadjdi, *al-Wa'ie* (Bogor: Pimred *al Waie*, 2005).

diatur hanya oleh syariat Islam. Kesadaran umat ini mendorong mereka untuk menuntut perubahan sistem negara yang telah menyimpang jauh dari Islam.[19]

c. *Shira'ul Fikri* (Pergolakan pemikiran)

Shira'ul Fikri sebagai suatu keniscayaan, perubahan masyarakat haruslah diawali dengan perubahan pemikiran di tengah-tengah masyarakat tersebut. Agar terjadi perubahan, masyarakat harus tahu bahwa pemikiran yang selama ini mereka anut dan percayai adalah keliru dan rusak bahkan membahayakan mereka. Oleh karena itu perlu dijelaskan di mana kerusakan ide tersebut dan bahayanya kepada masyarakat. Di sinilah letak penting *shira'ul fikr* (pergolakan pemikiran) sebagai amal politik untuk merubah masyarakat. Pergolakan pemikiran ini dilakukan dengan cara menentang ide-ide yang salah, aqidah yang rusak atau pemahaman yang keliru di tengah masyarakat, dijelaskan kekeliruannya dan pertentangannya dengan Islam serta dijelaskan pula bagaimana ketentuan hukum Islam dalam perkara tersebut. Dalam konteks sekarang, yang dilakukan Hizbut Tahrir dalam aktivitas ini adalah menjelaskan kekeliruan ide-ide kufur seperti sekularisme, nasionalisme, demokrasi, HAM dan lainnya. Dijelaskan pula bahayanya bagi umat dan pertentangannya dengan Islam dan bagaimana pandangan Islam dalam perkara tersebut. Secara praktis aktivitas ini bisa dilakukan melalui ceramah, khutbah jum'at, seminar, menerbitkan tulisan (buletin, koran, majalah) dan yang lainnya. Aktivitas *shira'ul fikri* ditujukan agar masyarakat memiliki kesadaran tentang kerusakan ide-ide kufur yang selama ini mereka anut, mencampakkan ide-ide tersebut dan menggantikannya dengan Islam.[20]

d. *Kifahus Siyasi* (Perjuangan Politik)

Kifahus Siyasi diyakini bahwa sebuah sistem politik (negara atau masyarakat) akan berjalan selama rakyat masih percaya kepada penguasanya untuk mengatur kehidupan mereka. Untuk merubah sistem tersebut haruslah diputus kepercayaan rakyat terhadap penguasa yang ada, pengkhianatan mereka terhadap rakyat, ketidakbecusan mereka mengurus rakyat berikut persekongkolan mereka dengan negara-negara musuh imperialis yang melestarikan derita rakyat.

Oleh karena itu Hizbut Tahrir dalam aktivitas perjuangan politik ini

[19]Ibid.
[20]Ibid.

menampakkan penentangannya terhadap negara-negara imperialis kafir dalam rangka membebaskan umat dari belenggu penjajahan mereka. Membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya baik berupa pemikiran, budaya, politik, ekonomi maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam termasuk menentang penguasa, mengungkap pengkhianat mereka, melancarkan kritik (muhasabah), kontrol dan koreksi terhadap mereka serta berusaha mengganti mereka apabila mereka melanggar hak-hak umat. Perubahan masyarakat pada dasarnya sangat ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap penguasa mereka yang menerapkan berbagai kebijakan atas mereka dan sikap mereka terhadap partai politik yang menginginkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu dalam aktivitas ini, Hizbut Tahrir selalu mengawasi dan mengkoreksi setiap kebijakan penguasa yang menyimpang. Menjelaskan bahayanya bagi umat dan bagaimana solusi Islam terhadap persoalan tersebut. Seperti mengkritik kebijakan kenaikan BBM, biaya pendidikan, transportasi, Undang-Undang Anti Terorisme dan lain lain. Sekaligus akan menghilangkan kepercayaan mereka terhadap penguasa mereka yang memang tidak layak. Diharapkan hal ini kan memperkuat kesadaran masyarakat untuk mengganti sistem rusak yang ada di tengah-tengah mereka dengan sistem Islam. Secara praktis dilakukan melalui seminar, *masiroh* (unjuk rasa damai), pengiriman utusan, kepada penguasa atau parlemen, penyebaran buletin dan selebaran *(nasyroh)*. Dari aktivitas ini masyarakat akan melihat bagaimana kepedulian dan kesiapan Hizbut Tahrir untuk memecahkan persoalan mereka.[21]

e. *Tholabun Nushroh* (Meraih Dukungan)

Tholabun Nushroh aktivitas ini dilakukan mengingat setiap sistem politik pastilah terdapat orang-orang yang kuat yang berpengaruh (ahlul quwwah), maka sikap orang-orang yang berpengaruh ini sangat menentukan keberhasilan perjuangan untuk menegakkan *Daulah Khilafah Islam*. Penerimaan mereka terhadap Islam yang disertai dengan kesadaran masyarakat akan mempercepat tegaknya sebuah sistem Islam demikian pula sebaliknya. Diharapkan dari aktivitas ini didapatkan dua hal yaitu perlindungan terhadap dakwah dan sampainya pada kekuasaan.

Dalam konteks saat ini, aktivitas *tholabun nushroh* dilakukan dengan

[21]Ibid.

mendakwahkan dan mencari dukungan dari kelompok-kelompok kuat dan strategis di tengah masyarakat. Saat ini rata-rata di dunia Islam yang menjadi kelompok kuat ini adalah pihak militer. Secara praktis hal ini dapat dilakukan dengan mengkontak tokoh-tokoh penting militer dengan berbagai cara atau mengirim utusan kepada mereka, mengajak dialog agar mereka mendukung penuh tegaknya Daulah Khilafah Islam.[22]

Tahap ketiga, tahapan pengambilalihan kekuasaan *(Marhalah Istilam Al-Hukm)*, yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia.

Strategi dakwah yang dilakukan oleh setiap DPW dan DPD Hizbut Tahrir Indonesia di seluruh Indonesia mengadakan pembinaan intensif bagi anggota dengan sistem halaqah-halaqah dengan tujuan untuk membangun kerangka Hizbut Tahrir, memperbanyak pendukung dan melahirkan kepribadian Islam hingga mereka mampu mengemban dakwah dalam menghadapi pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. Mereka dibekali materi sesuai dengan tingkatan dari halaqah-halaqah tersebut yang pada gilirannya mereka akan berinteraksi dengan masyarakat dan terdorong untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat dan mewujudkannya dalam realita kehidupan.

Hakikat dakwah Hizbut Tahrir adalah usaha untuk mendirikan negara Islam dan menjaga kesinambungannya. Negara Islam adalah negara yang terdiri atas agama Islam, negara yang melaksanakan syari'at Islam, yang bertugas menjaga tanah-tanah negara Islam, membela penduduk negara Islam, dan menyebarkan misi Islam di dunia. Sebetulnya tidak ada pertentangan sekitar hakikat Negara Islam bahwa menciptakan sebuah negara atau kepemimpinan umum bagi agama Islam merupakan kewajiban bagi kaum muslimin atau merupakan rukun asasi agama Islam. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam pada zaman sekarang sejak berakhirnya kekhalifahan di Turki termasuk terlena dan lalai dalam memenuhi kewajiban ini dan umat Islam bertanggung jawab sebagai konsekwensi dari sikap lalainya di hadapan Allah Swt. Itulah kewajiban umat Islam sekarang. Pengembangan sistem politik pada zaman modern merupakan hal yang mungkin bahkan wajib untuk

[22]Ibid.

dilaksanakan[23]

Kewajiban-kewajiban yang bersifat fundamental adalah pertama, persatuan program operasional antara sesama kaum muslimin untuk bersatu. Kedua, kaum muslimin diharapkan agar mendirikan negara mereka berdasarkan sistem syura. Ketiga, kaum muslimin juga diharapkan agar menyelesaikan permasalahan mereka melalui permusyawaratan anatar mereka dalam segala hal. Keempat, kaum muslimin diharapkan agar sdelalu saling membantu dalam kebaktian dan ketaqwaan. Kelima, kaum msulimin diharapkan agar bangkit bersama-sama menunaikan kewajiban jihad untuk menghalau musuh-musuh serta melindungi tanah-tanah dan negeri-negeri Islam. Keenam, kaum muslimin diharapkan berusaha memajukan rakyat kepada kebaikan, melarang kejelekan atau menghilangkan kemungkaran. Ketujuh, kaum muslimin diharapkan mampu mencurahkan seluruh tenaga untuk menyebarkan misi Islam di alam raya ini.[24]

Untuk mewujudkan seluruh kewajiban dan tujuan tersebut, wajib diadakan kepemimpinan umum kaum muslimin dalam bentuk musyawarah kolektif. Dengan kepemimpinan ini, umat Islam telah melaksanakan kewajibannya yang telah diperintahkan oleh agama. Di sini ada pertalian kembali antara Islam dan sejarahnya, Islam akan selalu tetap utuh sebagai kekuatan operasional yang melindungi kekuatan spiritual masyarakat Islam. Islam memiliki orientasi untuk mendorong dunia pada kemajuan manusia atau kemajuan etika, mendorong dunia pada terbitnya era baru persaudaraan, persatuan dan perdamaian.

Keharusan kerjasama dalam menmyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang berkaitan dengan pola hubungan antar individu dan masyarakat diperlukan kesadaran dan kerjasama yang manifestasinya dituangkan dalam suatu institusi dan lembaga. Keharusan tersebut kemudian melahirkan teori tentang negara yang dapat menata masyarakat secara lebih formal dan bersifat kolektif .[25]

Dalam konteks perumusan teori tentang proses pembentukan negara dan pemerintahan tidak banyak yang berbeda di antara para pemikir politik Islam. bahwa keterbatasan manusialah yang menjadikan keniscayaan untuk saling bekerja sama

[23]Amin Rais *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan 2001) 163
[24]Ibid, 164.
[25]Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat Dan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 52.

(koperasi sosial) untuk dapat memnuhi keanekaragaman kebutuhan mereka, yang tidak mungkin dipenuhi oleh individu-individu manusia tanpa kerja sama. Beberapa konsep dan teori tentang kerja sama sosial (bahwa manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk personal) yang dikemukakan oleh al-Farabi, Ibn Rabi', al-Ghazali, al-Mawardi dan Ibn Taimiyah sesungguhnya merupakan kerangka dasar bagi teori *as'abiyah-nya* Ibn Khaldun. Dalam pandangan sosiologi bahwa manusia adalah makhluk sosial merupakan teori dasar yang kemudian dikembangkan di Barat. Adanya persamaan konsep dasar antara Islam dan Barat yaitu adanya kebutuhan logis dan rasional manusia. Perbedaan dasarnya adalah kalau dalam konsep Islam selain merupakan kebutuhan alamiah, secara doktrinal memang fithrah yang diciptakan Allah bagi manusia, sedangkan dalam pandangan Barat kerja sama sosial itu dilakukan atas pertimbangan rasional dan *natur* (watak dasar) manusia.[26]

Urgensi atau hajat terhadap pembentukan institusi negara ini melahirkan ijtihad bahwa hajat itu bersifat wajib atas dasar syari'at (wajib syar'i) berdasarkan konsensus (ijma') umat Islam. Hal ini adalah bukti sejarah dalam politik Islam, sebab pengangkatan Khalifah awal dalam Islam merupakan hajat yang mendesak pada waktu itu, sebagai upaya umat Islam untuk menggantikan tugas-tugas kenabian guna mengatur dan menata kehidupan masyarakat muslim.

Dalam praktik sejarah politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah Saw hingga *al-Khulafa al- Rasyidin* jelas bahwa Islam mempraktikkan di dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, di mana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur, panglima-panglima diangkat dan diberhentikan oleh Khalifah. Hal ini berlangsung sampai jatuhnya Daulah Muawiyah di Damaskus. Kemudian timbul tiga kerajaan Islam yang tampaknya terpisah satu sama lainnya yaitu Daulah Abbasyiyah di Bagdad, Daulah Uluwiyah di Mesir dan Daulah Muawiyah di Andalusia. Oleh karena itu walaupun dunia Islam itu terpecah menjadi tiga pemerintahan akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada di dalam wilayah darul Islam (Syarif,2008:200).

Dalam kehidupan kenegaraan sekarang, dua model ketatanegaraan oleh umat Islam dipraktikkan di beberapa negara. Bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk

[26]Ibid. 53.

republik telah dipraktikkan Republik Iran yang beraliran Syi'ah dan Republik Islam Pakistan, Republik Irak dan Republik Afghanistan yang beraliran Sunni. Beberapa negara ini telah menjadi contoh dari negara kesatuan Islam yang berbentuk republik. Sedangkan bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki dipraktikkan oleh Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, di mana pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan oleh keturunan penguasa (Syarif,2008:201). Jadi pada masa sekarang, umat Islam mempraktikkan negara kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa *(nation-state)* sebagai respon terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang.

Hal ini tentunya ada perbedaan bentuk negara yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir bahwa sistem negara adalah sistem Khilafah yang wilayahnya berskala internasional, seperti pada masa Dinasti-dinasti Islam masa lalu.

F. Gerakan HTI Pascareformasi

Gerakan reformasi di Indonesia telah memasuki usia ke 19 tahun (1998-2017), respon masyarakat luas terhadap gerakan ini sangat bervariasi, bahkan tidak lepas dari kritik terhadap jalannya reformasi. Akhir-akhir ini ada yang mengidolakan kembali lahirnya kembali Orde Baru, karena kehidupan di masa itu dirasa lebih baik dibandingkan saat ini yang serba mahal, serba tidak aman, serba susah, dan serba banyaknya bencana. Kerinduan masyarakat terhadap kehidupan masa Orde Baru ditangkap oleh para politisi untuk mendirikan partai politik, memberikan janji-janji politik dan menebarkan halusinasi kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan merujuk pada konstitusi UUD 1945. Pemilihan legislatif (pileg) yang telah berlangsung pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, para calon anggota legislatif (caleg) menawarkan janji-janji kepada konstituennya bahwa kalau terpilih menjadi anggota dewan akan memberikan kemakmuran rakyat, kemiskinan akan terkikis, pengangguran akan terkurangi dan yang lebih bergairah adalah akan memberantas korupsi, bahkan berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan menurunkan harga-harga kebutuhan pokok.

Salah satu yang dirasakan pada era reformasi adalah maraknya semangat berdemokrasi yang memberikan ruang kebebasan untuk mengekpresikan pikiran dalam bentuk tindakan yang terorganisir, maka lahirlah partai-partai politik dengan berbagai

macam azasnya, organisasi massa (ormas) dengan berbagai macam orientasi, dan lembaga swadaya masyarakat ataupun *civil society* dengan berbagai macam kepentinganya. Demokrasi sebagai ideologi dan sistem politik telah menarik perhatian banyak pihak. sehingga dengan demokrasi itulah diharapkan dapat memperbaiki sistem kehidupan.

Demokrasi menjamin keberlangsungan *civil society* sebagai penyeimbang kekuasaan dan sebagai agen perubahan ke arah kehidupan yang lebih mapan. Di saat suasana yang banyak mengalami perubahan adanya era transisi tersebut, berbagai eforia menjanjikan dinampakkan sebagai jargonnya. Di antaranya muncullah berbagai macam *civil society* yang menawarkan perubahan-perubahan, salah satunya adalah Hizbut Tahrir (HT). Gerakan Islam transnasional ini menawarkan perubahan sistem politik yang lebih radikal, karena akan merubah sistem politik Indonesia ke sistem politik *Khilafah Islamiyah*, bentuk Negara republik diganti dengan *daulah Islamiyah*. Sistem politik di negara-negara Islam dan muslim khususnya dan negara non Islam pada umumnya menerapkan sistem demokrasi model Barat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan sistem politik demokrasi oleh HT merupakan sistem kufur.[27] Adapun strategi yang di gunakan untuk melakukan perubahan adalah dengan dakwah, maka HTI telah memiliki model dakwah yang dianggap efektif dan efisiensi. Oleh karena itu yang menjadi pokok masalah adalah "bagaimana model dakwah Hizbut Tahrir Indonesia".

G. Jejak Arena Perjuangan HTI

Hizbut Tahrir حزب التحرير (*Party of Liberation*) merupakan salah satu gerakan yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Organisasi ini menahbiskan dirinya sebagai gerakan politik (*political movement-* الحركة السياسة) yang bertujuan membebaskan Islam dari kekuasaan kafir dan ingin membangun kembali sistem *khilâfah al-Islâmiyyah.*[28] Namun gerakan Hizbut Tahrir yang akan membangun kembali sistem *khilâfah al-Islâmiyyah* itu tidak berada dalam ruang hampa, tetapi dalam ruang (negara) yang telah memiliki sistem dan ideologi

[27] Abdul Qadim Zallum. *Demokrasi Sistem Kufur*. terj.: M.Shidiq al-Jawi. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2009).
[28] Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hlm. 4-5.

besar dunia yang memainkan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni demokrasi, kapitalisme[29] dan sosialisme,[30] sehingga kemungkinan terjadinya konflik ideologi tidak dapat dihindari.

Walaupun demikian. Hizbut Tahrir (HT) dapat berkembang di beberapa negara. Sampai dengan tahun 2013, HT telah berdiri di 48 (empat puluh delapan) negara, baik di negara Islam/ muslim (Kazaktan, Uzbekistan, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, Iran, Irak, Malaysia dan Indonesia), maupun negara sekuler (Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Kanada, dan Amerika Serikat). Semua negara ini telah menganut sistem politik demokrasi yang di dalamnya hidup subur kapitalisme. Namun sistem politik demokrasi tersebut ditolak HT bahkan dikatakan sistem kufur,[31] dengan alasan *pertama*, kedaulatan mutlak milik *syara'*, bukan milik rakyat; *kedua*, demokrasi adalah sistem kapitalisme murni; *ketiga*, *al-Hakim* adalah Allah, bukan manusia; dan *keempat*, kebenaran bukan ditentukan suara mayoritas.[32]

Eksistensi HT di beberapa negara Islam/ muslim mengalami kendala yang cukup berarti. Di Yordania sewaktu HT didaftarkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani kepada pemerintah untuk diakui sebagai organisasi politik tidak mendapatkan izin, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dinyatakan ilegal. HT juga dilarang mengadakan kegiatan di Bangladesh, karena diduga melakukan tindakan kekerasan, dan dianggap teroris, sehingga 40 aktivisnya ditangkap pemerintah. Nasib serupa terjadi di Tunisia, pemuda-pemuda HT ditangkap pemerintah, karena melakukan kritik keras terhadap kebijakan politik pemerintah. Di Turki yang selama ini dinilai menjadi sebab runtuhnya kekhilafahan, HT tidak dapat bergerak leluasa, 200 aktivis ditangkap pemerintah, 80 di antaranya masuk penjara. Di Pakistan, 30 pemuda HT ditangkap,

---

[29] Kapitalisme adalah suatu bentuk produksi yang dibatasi oleh suatu struktur dasar yang spesifik, mengenai hubungan-hubungan produksi yang melibatkan dua kelas, pemeras dan yang diperas. Lihat, Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, terj.:Joebaar Ajoeb, (Jakarta: TePLOK Press, 2000), hlm. 23. Lihat juga, Khandakar Elahi dan Constantine P Danopoulos, "Democracy, Capitalism and Development", dalam *Journal of Security Sector Management*, Volume 2 Number 2-June 2004, hlm. 7. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam kapitalisme ada prinsip kompetisi produksi dan ada kesamaan bagi para pelaku ekonomi.

[30] Sosialisme adalah "*any of various theories or system of social organization in which the means of producing and distributing goods is owned collectively or by a centralized government that often plans and control the economy*" (sosialisme adalah bermacam-macam teori atau sistem organisasi sosial dimana alat-alat produksi dan distribusi milik bersama-kolektif-atau pemerintah pusat yang merencanakan dan mengatur ekonomi. Lihat pula di *http://www.blackcrayon.com.*

[31] Abdul Qadim Zallum. *Demokrasi Sistem Kufur*..., hlm. 1.

[32] M.Abdul Majid al-Khalidi, *Analisis Dialektik Kaidah Pokok Sistem Pemerintah Islam*, terj. Harits Abu Ulya, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), 58.

karena diduga terlibat dalam teroris.[33] Semua kasus ini menandakan bahwa ada problem serius mengiringi keberadaan HT di negara-negara Islam, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam mewujudkan *khilâfah al-Islâmiyyah* yang selama ini menjadi inti perjuangannya.[34] Hal ini berbeda dengan di Indonesia yang disebut negara muslim dengan Pancasila sebagai ideologi negara, keberadaan HT sejak kedatangannya sampai sekarang (selama 28 tahun) tidak mengalami problem perjuangan karena belum pernah terjadi penangkapan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah. Konflik fisik dengan sesama anggota gerakan Islam lainnya juga belum pernah terjadi, bahkan perkembangan HTI cukup berhasil dengan berdirinya 33 pengurus tingkat wilayah dan 300 tingkat daerah.

HTI sebagai gerakan Islam transnasional[35] masuk ke Indonesia pada tahun 1983, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubaligh sekaligus aktivis Hizbut Tahrir dari Australia yang berasal dari Yordania. Abdurrahman datang ke Bogor untuk mengajar di Pondok Pesantren al-Ghazali, kemudian Masjid al-Ghifari IPB dijadikan sebagai tempat penyemaian ide-ide HT kepada mahasiswa. Mahasiswa yang telah menerima dakwah tentang seluk beluk HT, memiliki tugas memperkenalkan HT kepada aktivis mahasiswa lain di luar perguruan tingginya yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus (LDK), misalnya Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lain-lain.[36] LDK yang dihuni oleh sebagian mahasiswa yang telah menerima ideologi HT, secara kelembagaan berkembang menjadi Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus

---

[33] Lihat, dalam *http://www.hizbut-tahrir.or.id*

[34] Untuk mengetahui lebih lanjut keberadaan HT di beberapa negara Islam, yakni di Yordania, Palestina, Irak, Suriah, Lebanon, Kuwait, Mesir, Tunisia, Libya, dapat dilihat dalam Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqafah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, terj. Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa, (Bangil: Al-Izzah, 2008), 113-146.

[35] Islam transnasional adalah aliran Islam yang berasal dari luar negeri yang memiliki orientasi gerakan politik dan dakwah masuk ke Indonesia untuk mengembangkan gerakannya itu, misalnya Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Tabligh, Jama'ah Islamiyah, Gerakan Salafi. Lihat, Abu Za'rur, *Seputar Gerakan Islam*, terj. Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).

[36] Majalah *Sabili* No 9 Th. X. *Edisi Khusus Sejarah Emas Muslim Indonesia*. 2003. hlm. 142-143. Lihat. Zeyno Baran (ed.), *The Challenge of Hizbut Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology, Conference Report*, ([t.t]: The Nixon Center, 2004), hlm. 11.

(FSLDK) pada tahun 1986.[37] Muhammad Ismail Yusanto, aktivis Jama'ah Shalahuddin Universitas Gadjah Mada, menjadi salah satu pendiri forum ini, dan forum tersebut menjadi cikal bakal perkembangan HTI.

Kehadiran HT yang membawa ide, gagasan, dan sistem politik Islam sesuai dengan suasana batin mahasiswa yang sedang mencari solusi dari problem keumatan dan kebangsaan dalam dimensi politik. Secara social politik, umat Islam selalu terpinggirkan sehingga tidak memegang peran-peran strategis dalam pemerintahan. Pemerintah pada saat itu memiliki kiat untuk menjinakkan umat Islam, yakni dengan cara menciptakan rasa takut kalau berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Peristiwa Tanjung Priok, pemberlakuan asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi massa dan politik, pengebirian kebebasan kampus dengan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), menjadi faktor kebangkitan semangat mahasiswa dalam melakukan gerakan-gerakan. Semangat dakwah, jihad, ijtihad dan pentingnya pemerintahan yang berdasarkan Alquran dan Assunnah yang ditawarkan oleh HT menjadi tema menarik bagi mahasiswa. HT datang pada saat yang tepat, dan ide-ide yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan dianggap sesuai kebutuhan pada saat itu, sehingga mudah berkembang ke hampir semua kampus besar di Indonesia.[38] Apalagi tema tentang *ad-Daulah al-Islâmiyyah* (Negara Islam) yang pernah menjadi cita-cita sebagian umat Islam Indonesia, dengan gagasan Negara Islam Indonesia (NII),[39] dinilai sebagai bentuk pengamalan Islam yang *kâffah*, karena sebagian umat Islam berpendapat bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Bahkan bentuk kesultanan Islam di Nusantara (sebelum Indonesia Merdeka) yang telah ada di Indonesia, dan diyakini memiliki hubungan dengan kekhalifahan pada masa Abbasiyah.[40]

II. Dualisme Yang Takterpisahkan, Dakwah Dan Politik

Dilihat dari orientasi gerakan organisasi Islam di Indonesia sangat beragam

[37] Feriawan A.N., FSLDK Berhenti Berharap?, dalam *Special Report, Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1/2004. Lihat juga, Redaksi, "Wawancara dengan Ismail Yusanto", dalam *Special Report Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1/2004.

[38] Ibid.

[39] Negara Islam Indonesia (NII) dideklarasikan oleh Kartosuwiryo di Cianjur Jawa Barat pada tahun 1949, kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Aceh dan Sulawesi Selatan melalui Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) yang dipimpin oleh Kahar Mudzakir. Lihat, Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Penggabean, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004), hlm. 83.

[40] Anonim, *Khilafah dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009).

sesuai dengan corak pemikiran para pendiri atau penggeraknya dalam memahami ajaran Islam, sehingga dapat dipilah menjadi tiga orientasi gerakan, yakni:

1) Orientasi murni dakwah *amar makruf nahi munkar*. Artinya, gerakan ini hanya berorientasi dakwah saja, tidak tertarik ke politik praktis. Orientasi ini sungguh mulia, karena membangun masyarakat ke arah yang lebih baik dengan melalui perbaikan, perubahan, dan melakukan transformasi sesuai kondisi obyektif masyarakat yang menerima dakwah. Kondisi kemiskinan harta benda, ilmu, etika dan kemiskinan orientasi masa depan, dari waktu ke waktu tidak berkurang melainkan terus bertambah. Dalam teori sosiologi pembangunan disebut pembangunan dari bawah yakni membangun rakyat menjadi manusia seutuhnya, lahir batin, dunia akhirat. Gerakan Islam yang berorientasi dakwah tidak memiliki kesamaan dalam strategi dan metode berdakwah. Ada yang menggunakan metode kekerasan, ada yang dengan lemah lembut dari rumah ke rumah, ada yang dengan kebijakan, memberikan nasehat yang baik dan melakukan dialog keagamaan.
2) Orientasi murni politik. Artinya gerakan ini mengambil jalur politik struktural, melalui politik kekuasaan, dengan mendirikan partai politik yang berciri khas Islam, dan gerakan politik non parlemen. Gerakan Islam yang berada dalam orientasi ini hanya dengan politiklah Islam dapat ditegakkan, karena kalau gerakan Islam telah berkuasa dalam suatu negara, maka dengan mudah mengubah tatanan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. *Din wa dauah* (agama dan negara) menjadi satu kesatuan integral, tidak dapat dipisahkan. Namun sayangnya, hampir semua gerakan Islam di dunia yang berorientasi politik yang kemudian disebut gerakan politik Islam, tidak selalu menang dalam perebutan kekuasaan melalui prosedur pemilihan umum. Gerakan Politik Islam di beberapa negara, misalnya di negara-negara Asia Tenggara (Thailand, Philipina, Vietnam, Malaysia, dan Burma) tidak pernah memegang kekuasaan. Ini suatu problem serius bagi gerakan politik Islam, walaupun jumlah umat Islam tergolong besar, sehingga tidak ada hubungan signifikan antara jumlah umat Islam dengan perolehan suara partai politik Islam.
3) Memiliki orientasi dakwah dan politik. Inilah yang disebut dua sayap, yakni sayap

dakwah dan sayap politik. Ini dapat dimaknai bahwa dakwah untuk kepentingan politik, dan politik dijadikan payung untuk berdakwah. Makna yang pertama bahwa semua aktivitas dakwahnya memiliki kepentingan politik yang pada akhirnya dijadikan pijakan untuk meraih kekuasaan. bahkan keluhuran nilai-nilai zakat, infak, sadaqah yang dibagikan kepada mereka yang berhak menerima, mengandung kepentingan politik. Untuk itulah sering dijumpai dalam acara bakti sosial ke daerah-daerah bencana, ke desa-desa dan ke komunitas orang-orang lemah, bendera-bendera dan identitas partai politik selalu mendomininasi, lucunya besarnya nominal dari anggaran bakti sosial lebih kecil dibandingkan dengan besarnya belanja untuk bendera dan atribut lainnya. Makna yang kedua, politik dijadikan payung untuk berdakwah, artinya kalau kekuasaan telah berada dalam genggamannya, maka dijadikan sebagai alat untuk berdakwah melalui jalur instruksi dan pembuatan undang-undang, peraturan daerah, surat keputusan yang memaksa orang untuk berislam dengan baik.

Orientasi dualisme ini memang memiliki nilai positif dan negatifnya. Nilai positifnya sebagai bentuk perwujudan dari kesempurnaan Islam, yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dakwah dan politik tidak dapat dipisahkan, karena dalam dakwah juga perlu strategi, metode dan kekuasaan. Nilai negatifnya, dua sayap tersebut dapat mereduksi nilai luhur agama Islam itu sendiri, seolah-olah orientasinya hanya kekuasaan belaka, apalagi sering ditempuh berbagai macam cara untuk sekedar meraih kekuasaan, termasuk membeli suara secara langsung maupun melalui "broker politik" dengan nilai rupiah tertentu. *Money politics* memang melanggar peraturan, tetapi jarang kasus ini dibawa ke meja hijau, lantas pelakunya baik yang memberi maupun yang menerima divonis bersalah oleh pengadilan.

Hampir semua partai politik yang berasaskan Islam dan atau memiliki basis massa Islam dalam panggung politik praktis, tidak pernah ada yang bersatu. Masing-masing memiliki agenda sendiri dan selalu mengatasnamakan umat, program-program yang akan dilaksanakan juga untuk kepentingan umat Islam. Tetapi dalam realitas jarang mereka memperjuangkan umat Islam, yang diperjuangkan adalah diri sendiri dan komunitasnya. Tidak bersatunya partai politik Islam dan partai yang berbasis masa Islam

pada saat ada helatan pemilukada, masing-masing mengusung calonnya sendiri, walaupun kadang secara kalkulasi politik tidak akan menang, tetapi bersikukuh untuk mencalonkan sendiri dengan pertimbangan menaikkan daya tawar partai dihadapan partai lain dan untuk menarik simpati konstituen.

Ironisnya, sesama partai Islam mengunggulkan calonnya sendiri dan melemahkan calon dari partai Islam lainnya, sehingga satu dengan yang lain selalu menaruh curiga. Tepatlah dalam adagium politik, tidak ada kawan sejati dan tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan bersama. Tidaklah heran dalam rangka kepentingan bersama, partai politik yang berbeda secara ideologis dapat bekerjasama dan berkoalisi untuk menggolkan pasangan calon gubernur/ bupati/ walikota. Contoh kongkrit pencalonan calon gubernur dan wakilnya pada daerah pemilihan Jawa Barat beberapa waktu yang lalu, calon gubernurnya dari PKS, wakilnya orang PDIP, tetapi pasangan calon ini kalah, yang menang calon dari partai Golongan Karya. Logika linear mungkin tidak dapat menerima, bagaimana PKS dapat berkoalisi dengan PDIP. Itulah realitas politik yang harus dilihat dari logika loncatan. Peristiwa lain, kalau kepentingannya tidak terakomodasi, banyak para aktivis partai menyatakan keluar dari partai, dan mendeklarasikan partai politik baru yang diklaim sebagai partai Islam dengan mengajak teman-teman aktivis partai lain yang memiliki kepentingan bersama.

Oleh karena itu, orientasi dua sayap dari gerakan Islam tidak sungguh-sungguh ingin menegakkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan penuh kemakmuran. Sebaliknya, justru kepentingan pribadi dan komunitasnya yang diperjuangkan, sehingga sesama gerakan Islam yang memiliki orientasi sama tidak dapat dihindari terjadi gesekan-gesekan dalam melakukan kegiatan, sebagaimana yang pernah terjadi antara Muhammadiyah dan NU yang sama-sama berorientasi dakwah *amar makruh nahi munkar*, juga yang terjadi antara Muhammadiyah dengan PKS. Begitu juga HTI sebagai gerakan politik non parlemen yang menjadikan dakwah sebagai strategi untuk meraih kekuasaan tidak dapat dihindari terjadinya konflik dengan gerakan Islam dan politik yang lain.

Menurut Karl Marx, suatu kelas benar-benar dapat eksis di tengah masyarakat luas hanya ketika ada kesadaran sedang berkonflik dengan kelas-kelas lain. Kalau tidak

ada kesadaran ini kelas tersebut hanya eksis dalam dirinya sendiri, maka untuk menjadi kelas sebenarnya tidak dapat dihindari adanya konflik.[41] Apalagi kelas tersebut berada dalam masyarakat yang pluralistik atau multikulturalistik memiliki potensi konflik yang tinggi karena ada kompetisi di antara mereka untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kepentingannya.[42]

Tujuh belas ormas di atas, ada 10 ormas yang murni oreitnasinya dakwah, ada 3 ormas yang murni orientasinya politik, ada ada 4 ormas yang memiliki dualisme strategi. HTI walaupun sejak awal murni berorientasi politik dalam gerakannya, tetapi dalam praktiknya menggunakan dakwah sebagai strategi politik untuk meraih kekuasaan.

I. Strategi Dakwah HTI

Salah satu tujuan HTI yakni mendirikan *ad-daulah al-Islâmiyyah* dengan sistem *khilâfah* adalah agar memudahkan melakukan dakwah *amar makruf nahi munkar*. Dakwah yang dilakukan oleh penguasa akan lebih efektif dibandingkan oleh yang tidak memiliki kekuasaan. Penguasa memiliki *power* dapat menyusun undang-undang atau *dustûr* atau *qanûn* dapat disusun berdasarkan Alquran dan as-Sunnah, bahkan syariat Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dalam setiap hukum akan disertai dengan sangsi bagi mereka yang tidak mematuhinya. Ini merupakan kesempatan untuk dapat melaksanakan ajaran Islam secara *kâffah* dan mendakwahkan ke seluruh dunia.

HTI mengikuti metode dakwah Rasulullah saw, karena beliaulah contoh teladan yang baik (Q.S. al-Ahzab/33: 21). HT menerapkan operasionalisasi dakwah Rasulullah saw yang dibagi dalam tiga tahap, yakni:

1. Tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan). Pada tahap ini, dakwah dilakukan dengan mengundang orang-orang datang ke rumah, dan pada saat lain Rasulullah mendatangi orang-orang ke rumah, mengajak mereka masuk Islam, membangun keimanan dan pemahaman akan makna kalimah tahlil.
2. Tahap *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat, agar umat melaksanakan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupannya. Pada tahap ini ada perjuangan politik, karena

[41] George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Terori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi ,(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm.65.
[42] J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 97.

berhadapan dengan pemimpin kafir Quraisy yang secara sosiologis telah mapan dalam masyarakat, dan secara teologis telah memiliki keyakinan sendiri. Dakwah dalam tahap kedua penuh dengan perjuangan, dan dinamika, karena tidak mudah merubah masyarakat yang terbelenggu oleh kekuasaan dan keyakinan tradisional untuk dirubah menjadi orang yang beriman kepada satu Tuhan, Allah swt.

3. Tahap *istilamu al-hukmi* (penerimaan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh serta mendakwahkan risalah Islamiyah ke seluruh dunia.[43]

Tahapan dakwah ini oleh HT juga diterapkan dalam tahapan untuk meraih kekuasaan. Namun sebelum kekuasaan dapat diraih, haruslah didirikan partai politik yang benar, yakni dengan menempuh delapan belas langkah untuk mendirikan partai ideologis dalam meraih kekuasaan. Dakwah yang dilakukan HT adalah untuk meraih kekuasaan, maka dakwah hanya sebagai cara atau strategi politik.

Tiga tahap dakwah Rasulullah di atas dijadikan sebagai strategi juga untuk meraih kekuasaan di Indonesia, yakni:

1. Marhalah pertama **adalah**

مرحلة الدراسة والتعليم لإيجاد الثقافة الحزبية[44] **yakni tahap pengkajian dan belajar untuk mendapatkan budaya partai. Pada tahap ini** sesungguhnya tahap awal dalam pembentukan gerakan, dengan terbetuknya *halqah pertama* setelah memahami konsep dan metode dakwah *hizb*. *Halaqah* pertama itu kemudian menghubungi anggota-anggota masyarakat untuk menawarkan konsep dan metode dakwah *hizb*, secara individual. Siapa saja yang menerima *fikrah hizb* langsung diajak mengikuti pembinaan secara intensif dalam *haalqah-halaqah hizb* sampai mereka menyatu dengan ide-ide Islam dan hukum-hukumnya yang dipilih dan ditetapkan oleh *hizb*, sehingga mereka memiliki kepribadian Islam, yaitu mempunyai pola pikir yang Islami *(aklivah islamivah)*. Juga memiliki kepribadian yang Islami *(nafsivah Islamivah)*, sehingga akan menjadikan kecenderungannya selalu mengikuti Islam, dan dalam

[43] Syabab Hizbut Tahrir, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, terj.: M.Ramdhan Adi, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hlm. 118-130. Lihat juga Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hlm.42-43.

[44] Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Takattul al-Hizb*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), hlm. 36

menentukan langkah-langkahnya selalu sesuai dengan ajaran Islam. Sikap yang telah terbentuk akan melahirkan sikap rela kepada sesuatu yang diridlai Allah dan RasulNya, marah dan benci kepada hal-hal yang membuat Allah dan RasulNya murka. lalu mereka akan tergugah mengemban dakwah ke tengah-tengah umat setelah mereka menyatu dengan Islam. Sebab pelajaran yang diterimanya dalam *halaqah* merupakan pelajaran yang bersifat *amaliyah* (praktis) dan berpengaruh (terhadap lingkungan), dengan tujuan untuk diterapkan dalam kehidupan dan dikembangkan di tengah-tengah umat.

Apabila seseorang telah sampai pada tingkatan ini, dialah yang akan mengharuskan dirinya bergabung dan menyatu menjadi bagian dari gerakan *hizb*. Demikianlah yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. pada tahap pertama dalam dakwahnya yang berlangsung selama tiga tahun. Pada saat itu Beliau menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat secara perorangan dengan menawarkan apa yang telah diturunkan Allah SWT. kepadanya (berupa aqidah dan ide-ide Islam). Siapa saja yang menerima dan mengimani beliau berikut risalah yang dibawanya, maka ia akan bergabung dengan kelompok yang telah dibentuk Nabi Muhammad saw. atas dasar Islam, secara rahasia. Beliau selalu menyampaikan bagian-bagian risalah, dan selalu membacakan ayat-ayat Alquran yang diturunkan kepada beliau, sampai merasuk ke dalam diri mereka. Beliau menemui mereka secara sembunyi-sembunyi, mengajar mereka secara rahasia di tempat-tempat yang tidak diketahui masyarakat pada umumnya. Mereka melaksanakan ibadah juga secara diam diam, sampai saatnya Islam dikenal dan menjadi pembicaraan masyarakat di Mekah, sebagian mereka bahkan masuk Islam secara berangsur-angsur.

Pada tahap pembentukan kader ini, *hizb* membatasi aktivitasnya hanya pada kegiatan pembinaan saja. *Hizb* lebih memusatkan perhatiannya untuk membentuk kerangka gerakan, memperbanyak anggota dan pendukung, membina mereka secara berkelompok dan intensif dalam *halaqah-halaqah hizb* dengan *tsaqâfah* yang telah ditentukan sehingga berhasil membentuk satu kelompok partai yang terdiri dari orang-orang yang telah menyatu dengan Islam, menerima dan mengamalkan ide-ide *hizb*, serta telah berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkannya ke seluruh lapisan

umat. Setelah *hizb* dapat membentuk kelompok partai sebagaimana yang dimaksud di atas, juga setelah masyarakat mulai merasakan kehadirannya, mengenal ide-ide dan cita-citanya, pada saat itu sampailah *hizb* ke tahap kedua.

2. *Marhalah kedua* adalah :

مرحلة التفاعل مع المجتمع الذى يعيش
فيه , حتى يصبح المبداء عرفا ناتجا
عن وعى , وتعتبره الجماعة كلها
مبدأها حتى تدافع عنه جماعيا[٣١][45]

Maksudnya bahwa tahap interaksi dengan masyarakat tempat partai itu hidup, sehingga ideologi menjadi kebiasaan umum sebagai dari kesadaran masyarakat akan ideologi tersebut, sampai masyarakat menganggap bahwa ideologi partai adalah ideologi mereka, sehingga mereka bersedia membela bersama-sama. Tahap kedua ini merupakan tahap berinteraksi dengan masyarakat, agar umat turut memikul kewajiban menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya. Caranya yaitu dengan menggugah kesadaran dan membentuk opini umum pada masyarakat terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditanam oleh *hizb*, sehingga mereka menjadikan ide-ide dan hukum-hukum tersebut sebagai pemikiran-pemikiran mereka, yang mereka perjuangkan di tengah-tengah kehidupan, dan mereka akan berjalan bersama-sama *hizb* dalam usahanya menegakkan *ad-daulah al- khilâfah*, mengangkat seorang *khalîfah* untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada tahap ini *hizb* mulai beralih menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara kolektif.

3. Marhalah ketiga, adalah:[46]

مرحلة تسليم زمام الحكم عن طريق
الأمة تسليما كاملا , حتى يتخذ الحكم
طريقة لتطبيق المبدأ على الأمة ٣٢

[45] Ibid.
[46] Ibid.

Maksudnya adalah tahap menerima kekuasaan secara menyeluruh melalui dukungan umat, sehingga partai tersebut dapat menjadikan pemerintah menjadi metode untuk menerapkan ideologi atas umat. Kekuasaan sebagai puncak pencapaian tahapan pencerahan umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Menurut Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara HTI, tahapan ketiga ini seperti penyerahan kekuasaan dari kaum Anshar kepada Rasulullah saw sewaktu tiba dari Mekah dalam perjalanan hijrahnya.

Berdasarkan strategi dakwah yang digunakan oleh HTI dengan meniru strategi Rasulullah saw, maka ada dua strategi besar yang dimainkan oleh HTI yakni kultural dan struktural atau politik.

1. Strategi Kultural

Strategi ini dilakukan HTI melalui dakwah dan jihad. Dua hal ini dilakukan untuk mempengaruhi dan melakukan transformasi pemahaman umat akan pentingnya tegaknya *khilâfah al- Islâmiyyah*. Ingat bahwa HTI adalah gerakan politik, sehingga semua yang dilakukan memiliki dimensi politik, termasuk dalam berdakwah juga mengandung dimensi politik. Wajarlah kalau logika yang dibangun oleh HTI, yakni melakukan proses-proses dakwah untuk meraih kekuasaan, setelah kekuasaan diraih juga untuk mengembangkan dakwah ke seluruh dunia, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

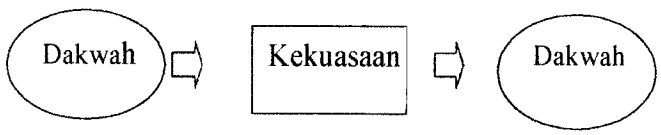

Dakwah HTI untuk membangun kesadaran umat tentang kesempurnaan Islam, salah satunya bahwa politik tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam. Pentingnya dakwah ini dapat dilihat dalam salah satun kitab kajian HTI yakni *ad-daulah al-slâmiyyah*,[47] terdapat 55 tema yang dibahas dapat dikelompokkan ke dalam dua tema besar, yakni tema dakwah, dan tema politik. Taqiyuddin dalam bukunya ini

[47] Taqiyuddin an-Nabhani, *ad-Daulah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2002).

sebelum membahas politik lebih dahulu membahas mengenai dakwah, ada 10 tema. Inilah logika yang dibangun oleh Taqiyuddin yang kemudian diikuti oleh HT, bahwa sebelum membahas politik lebih dahulu harus dipahami tentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. baik sewaktu berada di Mekah maupun sesudah hijrah ke Madinah. Perjalanan sejarah dakwah Rasulullah saw. berpuncak di Madinah yakni membangun negara Islam yang kuat. Untuk dapat kuat, maka bangunan spiritual, akidah dan keyakinan umat Islam harus kokoh, dan ini dibangun sewaktu di Mekah dengan memakan waktu selama 13 tahun. Setelah akidah atau moralitas umat telah kokoh, barulah membangun tata politik, ekonomi dan sosial di Madinah. Negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah saw. di Madinah yang begitu kuat memudahkan untuk melakukan futuhat, berdakwah kepada raja-raja atau kepala negara yang lain untuk memeluk agama Islam. Di sinilah pentingnya kekuasaan yang kuat, sehingga mudah untuk melakukan dakwah.

Dakwah dan politik bagi HTI merupakan dua sisi mata uang, artinya seperti dalam gambar di atas, HTI menggunakan dakwah untuk kepentingan politik, dan apabila kepentingan politik telah diperoleh, yakni kekuasaan telah berada dalam genggamannya, maka kekuasaan itu digunakan untuk melancarkan dakwah Islamiyah.

Dakwah dan politik diletakkan dalam posisi fungsionalis, bukan posisi struktural apalagi harus dihadap-hadapkan seolah-olah keduanya bagaikan air dan minyak. Dakwah dan politik dalam pandangan HTI adalah satu kesatuan yang integral, ini berdasarkan pemahaman bahwa agama dan negara atau politik itu memiliki hubungan integralistik formalistik (*din wa daulah*), karena Islam diyakini agama yang sempurna, mengatur semua kehidupan manusia. Tidak ada satu pun dari sisi kehidupan manusia yang tidak dijelaskan aplikasinya dalam Islam, baik dalam Alquran maupun as-Sunnah. Untuk itulah dalam tataran aplikasi dua sayap, yakni sayap dakwah dan politik sering terjadi gesekan-gesekan, karena keduanya memiliki strategi yang berbeda. Dakwah ditujukan untuk melakukan perubahan atau transformasi sosial ke arah yang lebih baik, sedangkan politik ditujukan untuk memperoleh *power* atau kekuasaan.

Namun di tangan HTI, dakwah dijadikan media untuk meraih kekuasaan, maka tahap awal terbentuklah *kutlah-kutlah*. Tujuan *kutlah* adalah melanjutkan kembali kehidupan Islam di negara Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Setiap *kutlah* mempelajari dan memahami Islam agar terwujud *aqliyah* dan *nafsiyah* yang Islami, sehingga terbentuk *syakhshiyah Islamiyah*.[48] *Kutlah* atau kelompok pada esensinya adalah aktivitas politik.

Dua sayap dakwah dan politik juga dimiliki oleh *tarbiyyah* yang kemudian dijadikan ideologi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tertera dalam pernyataan bahwa "salah satu fikrah dakwah kita adalah bersifat *siyasi*, sehingga seorang muslim harus ber-*siyasi* (bersiasat) untuk memperoleh kemenangan. Penerapan siasat dalam konteks kontemporer, seorang muslim harus dapat memilih partai atau jamaah yang sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan fikrahnya. Untuk itu kemampuan membandingkan antarpartai Islam dengan obyektif sangat penting, sehingga keikutsertaannya bukan taklid atau hanya mengekor".[49] Ini berarti dakwah menjadi media untuk memperoleh anggota sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya diharapkan untuk memilih partai politik, sehingga dakwah diorientasikan untuk memperoleh kekuasaan. Hanya saja PKS telah menjadi partai politik yang mengikuti pemilu dan memiliki wakilnya duduk di parlemen, bahkan kader terbaiknya telah menduduki di lembaga eksekutif, baik menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II, maupun menjadi gubernur/ wakil dan wali kota, bupati/ wakilnya. PKS masuk dalam sistem politik Indonesia, sementara HTI masih berada di luar sistem, sehingga peran politiknya belum dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun demikian, HTI dan PKS dalam penelitian yang dilakukan oleh Irwan Omar, sama-sama gagal melawan hegemoni pemerintah Indonesia.[50]

Dakwah HTI untuk dapat mempengaruhi umat mengikuti *fikrah* dan *tharîqah*-nya antara lain dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: (1) Majalah *Al-*

[48] Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbu al-Tahrir*, ([t.t.] : Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 77-78.
[49] Lihat, Muhammad Syadid, *Manhaj Tarbiyah: Metode Pembinaan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Rabbani Press, 2003), hlm. 205-206.
[50] Irwan Omar, *Kegagalan HTI dan PKS Sebagai Gerakan Counter Hegemoni*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2009).

Wa'ie, merupakan majalah yang terbit sebulan sekali dengan nama lengkap "Media Politik & Dakwah *Al-Wa'ie* Membangun Kesadaran Umat". (2) Tabloid Media Umat Memperjuangkan Kehidupan Islam, ini terbit setiap bulan dua kali. (3) Bulletin mingguan yang diberi nama "Al-Islam". Buletin ini terbit reguler setiap minggu, didistrribusikan oleh para aktivis HTI terutama pada hari Jum'at di masjid-masjid, dan setiap terbit dicetak sebanyak 1.000.000 (1 juta) eksemplar. Penerbitan buletin "Al-Islam" menurut K.H. Muhammad Al Khathath, Pimpinan DPP HTI, bahwa penerbitan "Al Islam" memiliki dua maksud, yakni *pertama*, dalam rangka membuka wawasan dan membangun kesadaran umat Islam untuk kembali merengkuh Islam dalam aspek ruhiyah dan *siyasiyah*. *Kedua*, membantu memberikan pemahaman dan keikhlasan berkorban untuk kembali melanjutkan kehidupan Islam dalan naungan *daulah khilâfah al-Islâmiyyah*.[51] Judul dalam buletin, misalnya terbitan tahun 2004, merupakan respon dari problem dan isu-isu nasional yang sedang aktual, yang dapat dipetakan dalam beberapa tema, baik tema politik, ekonomi, budaya, dan tema tentang dakwah-jihad.

Judul-judul dalam bulletin Al-Islam setidaknya menunjukkan konsistensi HTI dalam memperjuangkan tegaknya *khilâfah al-Islâmiyyah*, dan menurutnya *khilâfah* merupakan satu-satunya solusi dari berbagai macam persoalan kebangsaan. (4) d. *Website* dengan alamat http://hizbut-tahrir. or.id. Dalam situs resmi HTI ini terdapat beberapa hal yang mudah diakses dan didownload, baik tentang berita, pernyataan resmi organisasi dan artikel tentang HTI itu sendiri. Bahkan buku buku HT dengan mudah dapat diperoleh tanpa membayar. (5) Pengajian dan khutbah juga sebagai media yang efektif untuk mempengaruhi umat Islam. Pimpinan, kader dan aktivis HTI disebar untuk aktif memberikan pengajian dan sebagai khotib di masjid-masjid di seluruh Indonesia. (6) Radio & video streaming, juga dijadikan media dakwah yang efektif, karena memiliki jangkauan yang luas. (7) Kajian-kajian, untuk mensosialisasikan *khilâfah al-Islâmiyyah* dan sikap, solusi dan gagasan yang ditawarkan oleh HTI tidak hanya dengan demonstrasi yang dihadiri oleh aktivis dan simpatisan yang jumlahnya ribuan, ditambah orasi atau pernyataan sikap yang

[51] Muhammad Al Khaththath, "Kata Pengantar", dalam *Bundel Buletin Dakwah Al-Islam Melanjutkan Kehidupan Islam Tahun I*, (Bogor: Yasmin Press, 2004), hlm.iii.

disampaikan oleh Pimpinan HTI. Kajian intensif yang dikemas dalam bentuk halaqah Islam dan peradaban juga menjadi media, mengingat yang menjadi sasaran adalah orang-orang terdidik, misalnya mahasiswa, pelajar, dosen, guru, dan tokoh Islam. Adapun tema yang diangkat dalam halaqah tetap berkisar tentang *khilâfah al-Islâmiyyah* sebagai satu-satunya sistem untuk menjadi solusi dari berbagai problem keumatan dan kebangsaan, dan problem-problem yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia, misalnya tentang kenaikan harga BBM, sekularisme, kapitalisme, penegakan syariat Islam, Bank Century, dan tentang Obama, pembagian kondom gratis.

Dakwah menurut HTI ada tiga macam, yakni *pertama,* dakwah *fikriyah,* dakwah melalui penyebaran pemikiran untuk menanamkan pemikiran Islam dan menghancurkan atau membantah pemikiran yang tidak Islami. *Kedua,* dakwah *siyasiyah,* dakwah yang digerakkan untuk tercapainya tujuan politik yakni tegaknya syariat dan *khilâfah. Ketiga,* dakwah *askariyyah,* dakwah melalui kekuatan militer atau jihad *fî sabîlillâh.* HTI sekarang sedang melakukan dakwah *fikriyyah* dan *siyasiyyah* sekaligus melalui berbagai *uslub* (cara) dan *wasîah* (sarana), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dakwah secara langsung di antaranya seperti yang dilakukan HTI melalui forum forum publik seperti seminar, diskusi, *talkshow*, tabligh akbar, khutbah Jum'at, pengajian-pengajian dan lain sebagainya yang di lakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam satu minggu dilakukan puluhan bahkan mungkin ratusan forum-forum semacam itu.

2. Strategi Politik

Salah satu strategi politik yang diusahakan oleh HTI untuk menegakkan *khilâfah al-Islâmiyyah* adalah dengan demonstrasi, sebagai media untuk membentuk opini publik, dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan politik, ekonomi, dan kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak. Demonstrasi selain sebagai media untuk memobilisasi massa dalam merespon setiap persoalan keummatan dan kebangsaan, juga menjadi salah satu cara yang mudah untuk mempengaruhi massa dan menciptakan nalar publik sesuai dengan yang

diperjuangkan. Selain itu demonstrasi dengan mengerahkan massa dalam rangka menunjukkan eksistensinya sebagai gerakan yang sigap, cepat, dan tanggap atas problema yang sedang dihadapi oleh umat dan bangsa.

Demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. baik protes itu ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan. Selain itu demonstrasi juga biasa disebut dengan istilah unjuk rasa. Namanya saja unjuk rasa, maka yang dilakukan adalah memperlihatkan atau menunjukkan dalam bentuk pikiran, sikap dan tindakan apa-apa yang selama ini dirasakan. Kata protes dalam pengertian ini menjadi kata kunci dari demonstrasi. HTI dalam setiap melakukan demonstrasi jauh dari tindakan anarkis, sehingga ada nilai kemanfaatan atau sisi positifnya. Menurut Muhammad Ismail Yusanto, HTI dapat menyelenggarakan aksi damai itu sudah merupakan hasil. Mereka datang bukan karena dibayar dan memang tidak pernah dibayar. Justru malah mereka mengeluarkan uang untuk datang ke tempat demonstrasi.

Sampai-sampai ada tokoh politik di Indonesia yang mengatakan bahwa yang bisa melakukan hal yang seperti itu hanyalah HTI, parpol yang lain tidak akan bisa kecuali harus mengeluarkan uang.[52] Aksi itu sendiri pun sebenarnya adalah hasil. Secara internal buat peserta aksi, mereka akan semakin yakin bahwa gagasan syariat dan *khilâfah* itu terus semakin mendapatkan dukungan. Apalagi ketika mereka melihat bahwa perjuangan ini merupakan murni untuk Islam karena memang tidak ada tendensi politik praktis sama sekali. Karena memang HTI dikenal sebagai parpol yang tidak ikut dalam perebutan kursi di parlemen atau di pemerintahan. Lebih lanjut Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HTI memunculkan kesadaran politik dan semangat perjuangan. Artinya bahwa ketika demo itu semakin hari semakin besar, maka akan memunculkan kekuatan masa yang masif, yang diperkirakan cepat atau lambat orang tidak bisa mengabaikan begitu saja, karena ekspresi dari aspirasi masyarakat itu, di antaranya dalam konteks kehidupan sekarang ini tercermin dari seberapa besar masyarakat itu terlibat di dalam demonstrasi, semakin besar jumlah umat yang mengikuti demonstrasi, menunjukkan

[52] Iubir HTI "Wacana Penting Untuk Perubahan dan Tegaknya Khilafah" dalam *http://hizbut-tahrir.or.id/category/hizbut-tahrir/page/2/*

semakin berarti besar pula aspirasi masyarakat.[53]

Setiap ada problem aktual yang dihadapi oleh umat dan bangsa, misalkan kasus Bank Century, HTI selalu tampil menyuarakan apa yang selama ini diperjuangkan. Kasus Bank Century adalah permainan kapitalis, dan kasus ini tidak akan muncul dalam sistem ekonomi Islam di bawah *khilâfah al-Islâmiyyah*. Strategi yang digunakan HTI adalah dengan melakukan demonstrasi yang diselenggarakan di kota-kota besar, mengerahkan massa dengan membawa atribut berupa bendera, spanduk dan selebaran, sebagaimana Sekitar 10.000 massa HTI melakukan aksi unjuk rasa damai menunjukkan sikap mereka terkait skandal Bank Century, Ahad (6/12/ 2009) pagi di Jakarta. Tema demonstrasinya adalah "*Bersihkan Indonesia dari Sistem dan Rezim Korup*"

[53] Ibid.

BAB III
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Aktivis HTI di Perguruan Tinggi Jember terhadap Pancasila dan NKRI pascapenetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017

1. Interaksionisme Simbolik Aktivis HTI dan Pemerintah RI; Pancasila dan NKRI Sebagai Wujud Interaksionisme Simbolik

Melacak sejarah Indonesia, sebagaimana jejak yang dilakukan *founding father* kita Sukarno memandang Pancasila sebagai sesuatu yang khas bangsa Indonesia. Ia lahir dari renungannnya atas konteks bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila adalah kristalisasi semadi Sukarno atas kearifan bangsa Indonesia yang tenggelam dalam kekuasan pemerintah kolonial. Ia berisi cita-cita dan harapan bangsa Indonesia.[1] Pengalaman hidup berkomunitas *ala* masyarakat nusantara yang sempat tertahan dan terbenam dalam kekuasaan penjajah Belanda, terekam kuat dalam Pancasila. Senada dengan itu, M. Hatta menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari kenyataan bangsa Indonesia yang terpuruk oleh penjajahan. Kata Hatta, "Pancasila adalah cita-cita untuk masa yang akan datang sebagai reaksi terhadap realita yang pahit berupa kesengsaraan rakyat, penghinaan, pemerasan, dan penderitaan bangsa di bawah kekuasaan otokrasi kolonial."[2] Jadi, Pancasila adalah kristalisasi cita-cita hidup bangsa Indonesia, masyarakat nusantara, yang sempat terkubur selama masa penjajahan Belanda. Tepat sekali kalau Yudi Letif memandang Pancasila sebagai warisan dari jenius nusantara.[3]

Kelahiran Pancasila sebetulnya bermula dari kehendak kuat bangsa Indonesia untuk merdeka. Menurut Yudi Latif, cikal bakal kelahiran Pancasila adalah aksi Perhimpunan Indonesia di Belanda (1924) yang merumuskan konsepsi ideologi politiknya yang mencakup empat prinsip tujuan kemerdekaan, yakni: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Konsepsi ideologis ini, kata Yudi Latif, merupakan hasil sintesis dari

---

[1]Menurut Sukarno, Pancasila adalah hasil ia merenung di bawah pohon sukun di Ende. Pohon sukun tersebut bercabang lima dan menghadap ke laut. Di bawah pohon sukun itulah konsepsinya mengenai Pancasila selesai diolah. Setelah menjadi presiden pertama di Indonesia, Bung Karno kembali mengunjungi Ende pada tahun 1950. Saat itu juga dia kembali mengingat pohon sukun tempat ia merenung dan menegaskan kembali bahwa pohon sukun tersebut adalah tempat ia merenungkan Pancasila, yang pada waktu ia berkunjung sudah menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia merdeka. Sebelumnya, tak seorang pun tahu hal itu hingga Sukarno sendiri mengungkapkannya. Tim Nusa Indah, 2015. Bung Karno dan Pancasila, Ilham Dari Flores untuk Nusantara, Ende, Nusa Indah, hal. 77-78.

[2]Karya Lengkap Bung Hatta, 2000. *Buku 2 Kemerdekaan dan Demokrasi*, Jakarta, LP3ES. hal. 394

[3]Yudi Latif, 2011.*Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia, hal. 2.

ideologi-ideologi terdahulu. Prinsip persatuan nasional adalah tema *Indisch Partij, non-kooperasi* adalah kerangka politik komunis, kemandirian adalah tema Sarekat Islam, sementara solidaritas adalah simpulan yang mengikat atau mengutuhkan ketiga tema tersebut.[4]

Selain konsepsi ideologis di atas, buah pemikiran kritis para tokoh pejuang seperti Tan Malaka dan Tjokroaminoto terlalu berharga untuk dilupakan. Kedua tokoh itu punya pengaruh besar bagi perjuangan dan kegiatan politik Sukarno. Tan Malaka melalui bukunya *Naar de Republiek Indonesia (*menuju Republik Indonesia) memberi gagasan brilian menyangkut demokrasi. Baginya, demokrasi berakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat nusantara. Sementara itu, Tjokroaminoto dalam rentang waktu yang beriringan mengumandangkan pentingnya sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi dalam rangka menjadi "para demokrat dan sosialis sejati".

Simbol burung garuda yang terdapat dalam pancasila merupakan sebagai simbol yang khas Indonesia, yakni burung rajawali yang ada di negeri ini. Rajawali hendaknya diterjemahkan dengan kekinian sebagai makhluk perkasa, sebagai Batman yang mampu menakhlukkan jagat raya. Rajawali merupakan makhluk atau konsep berpikir yang bebas progresif, mampu mengarungi jagat raya dan samudera terbang ke mana-mana. Mampu menghadang angin dan topan yang menerjang. Panas terik matahari, dan hujan bukan penghalang untuk dapat eksis di era globalisasi dan digitalisasi.

Dengan pemaknaan-pemaknaan yang progresif, diharapkan ke depan generasi bangsa tumbuh sikap optimis secara masif, wacana kemerdekaan berpikir kritis logis akan dapat menyemai menumbuhsuburkan gerakan pemikiran kesadaran akan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemaknaan nilai-nilai spiritualitas ajaran leluhur bukanlah slogan semata, namun perlu diterjemahkan dalam perilaku hidup di masyarakat sebagaimana inti makna spiritualitas pancasila yang berkepribadian konteks Indonesia. Melalui komitmen ajaran yang diamalkan secara terus menerus dari generasi ke generasi, setidaknya masyarakat akan memiliki kekebalan terhadap berbagai rayuan, ancaman dan gangguan. Mereka harus sadar, bahwa ajaran leluhur memiliki superioritas khasanah keilmuan maupun pemikiran, memiliki daya tawar yang sangat relevan dengan konteks zaman kekinian.

[4]*Ibid.*, hal. 5-6

Berangkat dari agenda pemerintah yang menetapkan Perppu no. 2 tahun 2017 tentang aturan organisasi yang dianggap berseberangan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka secara tidak langsung bahwa HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila akhirnya izinnya dicabut dan dibubarkan oleh pemerintah. Adanya kekecewaan yang dianggap tidak adil dari kebijakan pemerintah tersebut, pengikut HTI pun tidak tinggal diam. Mereka di antaranya mengambil berbagai sikap dan pandangan, bagaimana aktivitas yang mereka lakukan masih dapat berjalan seperti biasanya dan lebih agresif dalam melakukan even-even tertentu.

Dialektika yang terjadi antara pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia sebenarnya terletak pada objek materi simbol bahasa komunikasi tertulis, simbol Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia !945. Ketika terdapat sikap-sikap warganegara Republik Indonesia yang disinyalir apakah secara eksplisit maupun implisit yang ditengarai tidak patuh atau menyimpang terhadap kebijakan pemerintah, secara dini pemerintah juga mengambil sikap komunikatif yakni dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap dapat mengatasi problematika umat. Pemerintah dengan tegas menetapkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 sebagai makna antisipatif tindakan makar dari warganegaranya.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam pandangan interaksionisme simbolik, sebagaimana ditegaskan Blumer, proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan kehidupan kelompok. Menurut teoritisi interaksionisme simbolik kehidupan sosial pada dasarnya adalah "interaksi manusia dengan menggunakan symbol-simbol". Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Penganut interaksi simbolik berpandangan, perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka, jadi tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan, sebagaimana dianut oleh teori behavioristik atau teori struktural. Bahwa

perilaku dipilih sebagai hal yang layak dilakukan berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada.[5]

Pendapat senada mengungkapkan pula bahwa pendekataan teori interaksionisme simbolik berfokus pada cara manusia dalam berinteraksi melalui simbol-simbol yang ditafsirkan. Komunikasi yang terjadi bukan saja melibatkan simbol-simbol verbal seperti kata, frasa atau kalimat, akan tetapi proses komunikasi tersebut juga melibatkan proses pertukaran simbol yang bersifat non verbal seperti isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, dan sentuhan sehingga diri sang aktor yang terlibat dalam proses tersebut mampu untuk membacanya. Untuk itu, komunikasi yang terjalin secara pribadi bukan karena didasarkan tindakan pribadinya, melainkan karena keanggotaan dirinya dalam kelompok masyarakat.[6]

Terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2017 bagi kalangan aktivis HTI, sikap yang diambil adalah sikap pembelaaan diri, dengan menggugat kebijakan pemerintah. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mengajukan gugatan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) merespons terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan. Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra,mengungkapkan pihaknya akan mengajukan gugatan uji materi pada Senin (17/07/2017). "Saya tadi sudah bicara dengan HTI dan kita sepakat hari Senin (17/07/2017) kita akan ajukan *judicial review*nya. Ormas-ormas lain yang akan bergabung, silahkan," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada BBC Indonesia. Yusril berargumen Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada kegentingan yang memaksa dikeluarkannya aturan pengganti. Menurutnya, sekarang ini tidak ada alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa situasi ini memaksa lantas pemerintah harus mengatasi keadaan dengan mengeluarkan Perppu. Itu salah satu pertimbangan kita untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi. Yusril menilai perubahan regulasi tentang

[5] Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitiankualitatif pendekatan positivistic, rasionalistic, phenomenologic,dan metaphisik telaah studi teks dan penelitian agama*, (Bandung : PT. Bayu Indra Grafindo,1996),135.

[6] Umiarso dan Elbandiasyah, *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 214.

ormas ini bukan hanya menyoal HTI saja, melainkan bakal berdampak luas pada ormas-ormas lain.[7]

Demikian pula dengan perspektif aktivis HTI yang lain, mereka juga memiliki berbagai argument dan pandangan mengenai Perppu no 2 tahun 2017 yang intinya membubarkan HTI. Berbagai perspektif dari aktivis HTI memiliki sudut pandang tentang sikap yang dilakukannya dalam menilai Pancasila sebagi dasar negara Republik Indonesia, juga terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula, langkah dan strategi telah dipersiapkan dalam menyikapi yang sudah diputuskan oleh pemerintah.

Salah satu pengikut HTI yang alumnus dari IAIN Jember ketika peneliti mewawancarainya kepada saudara Fira, tentang bagaimana aktivitas kegiatan para pengikut HTI selama ini pasca adanya Perppu no 2 tahun 2017, apakah masih aktif ataukah sudah tidak ada kegiatan lagi. Fira mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Selama ini apa yang saya lakukan dalam kegiatan organisasi HTI yang saya lakukan pascaPerppu no 2 tahun 2017 tidak berpengaruh kepada kegiatan yang saya lakukan sebagaimana biasa yang saya lakaukan sebagaimana biasa sebelum pasca dibubarkannya HTI oleh pemerintah. Kami tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah tersebut, karena menurut saya bahwa kebijakan pemerintah adalah tidak berdasar, itu menurut kami. Kami melakukan seperti biasa, setiap minggu kami melakukan kajian di organisasi saya, dengan teman-teman akhwat. Justru, di organisasi saya akan melakukan semacam pawai besar-besaran untuk menggalang massa sebanyak-banyaknya, bahwa kami tidak seperti yang dianggap oleh pemerintah."[8]

Dalam pandangannya bahwa Fira, kurang setuju dengan kebijakan pemerintah tentang Perppu no 2 tahun 2017. Menurutnya sikap arogan yang dilakukan pemerintah justru akan semakin membangkitkan akan kekuatan organisasinya. Ia berpandangan akan memperkokoh kekuatan yang ada dalam kelompoknya. HTI yang telah dibubarkan pemerintah, akan semakin memperkuat diri dan akan menggalang kekuatan massa. Fira dalam menilai kebijakan pemerintah adalah suatu kebijakan yang hanya membela kepentingan kapitalisme Barat. Kapitalisme Yahudi, inilah ketakutan pemerintah, mengapa fenomena saat ini semakin liar. Dapat dilihat realitasnya, bahwa mereka yang

[7] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia, diakses, 4 Septeember 2018.

[8] Wawancara dengan saudara Vira, 30 Agustus 2018. Ia adalah alumnus dari IAIN Jember. Dari hasil wawancara yang digali oleh peneliti, dia adalah salah seorang aktivis yang masih aktif dalam kegiatan halaqoh setiap minggunya. Menurutnya, bahwa yang ia yakini selama ini telah membawa kedamaian di hatinya.

kaya semaakin kaya, demikian pula yang miskin semakin miskin. Inilah yang tidak kami inginkam di kelompok kami. Bagaimana korupsi semakin merajalela, hal tersebut karena sikap materialisme tumbuh subur dalam masyarakat. Ketidakadilan tidak tercermin. Apakah yang demikian itu yang dikatakan pancasilais. mana keadilaan. Bahwa Negara Pancasila tidak dapat mencerminkan nilai-nilai Islami, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam berbagai pandangannya mengenai sikapnya yang menilai tentang Pancasila dan NKRI, Fira berpendapat bahwa ia cinta terhadap tanah air, akan tetapi tidak terhadap Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan ideologi kapitalisme. Kita harus berpedoman pada ajaran murni Alquran dan al-Hadits sebagai ajaran murni Islam yang dapat membuat keadilaan bagi manusia. Dengan ajaran murni ini tentunya keadilan akan dapat dicapai. Timbulnya ketidak adilan di negeri ini karena tidak mematuhi ajaran murni. Oleh karena itu ajaran murni ini perlu ditegakkan di negeri ini.[9]

Pandangan yang serupa juga dikemukakan saudara Ridoi, salah satu mahasiswa Universitas Negeri jember, ia mengemukakan sikapnya bahwa Pancasila adalah produk kapitalisme yang mengarahkan masyarakat Indonesia terjebak kepada sikap korup.

> "Andaikan Indonesia sila pertama adalah sebagaimana piagam Jakarta yang menyatakan bahwa, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tentu masyarakat Indonesia akan sejahtera. Adanya sikap sekuler seperti sekarang ini akhirnya yang terjadi dalam pemerintahan dan lembaga legislatif terjadinya korupsi jamaah yang massif..."

Demikian pula respon terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang disahkan pemerintah termasuk kebijakan yang kurang manusiawi, mengapa ketika ada warganegasranya yang taat kepada ajaran Islam justru dikebiri dan tidak memberikan peluang untuk lebih berkembang. Sikap pemerintah yang demikian akan menjadikan kelompok kami (HTI) akan semaakin tidak simpatik terhadap pemerintah. Pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap warganegaranya, hal inilah yang dapat menjadi sikap antipasti kepada pemrintahan saat ini. Apabila pemerintahan sebelumnya, telah

[9] Dalam wawancara dengan saudara Vira, peneliti mencoba mengurai bahwa ajaran murni yang ia kemukakan adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ia menguraikan tentang fenomena yang terjadi di Indonesia. Bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi kapitalisme yang hanya mementingkan kelompoknya saja, yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Pancasila adalah merupakan ajaran kapitalisme yang tidak sesuai dengan ajaran murni Islam.

memberikan ruang gerak yang longgar dari berbagai kegiatan kelompok aktivis HTI, di saat inilah pemerintah mengalami sikap yang berlebihan kepada kelompok kami.[10]

Dalam berbagai aktivitas yang dilakukan selama ini, Ridoi menjelaskan bahwa kegiatan dan rutinitas yang dilakukan tidak jauh seperti biasanya. Ia tidak terpengaruh dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Apa pun kebijakan pemerintah, itu adalah hak pemerintah. Akan tetapi, dengan adanya pentapan Perppu Nomor 2 tahun 2017, sikap dari kelompok dan aktivis kami harus selalu waspada. Dalam bertindak dan berperilaku, demikian juga perlu hati-hati, agar sikap kami tidak mudah terdeteksi oleh pihak-pihak lain yang tidak menyukai kelompok aktivis HTI.

Apa yang menjadi pandangan aktivis HTI yang dikemukakan di atas merupakan implikasi dari penafsiran dan pemaknaan aktivis HTI terhadap pemerintah dalam hal ini yang menjadi simbolnya adalah Pancasila dan NKRI. Aktivis HTI telah melakukan internalisasi berupa penafsiran-penafsiran terhadap symbol-simbol. Ketika penafsiran yang sudah menjadi keyakinan bagi aktivis HTI, maka apa dan bagaimana tindakan aktivis HTI terhadap pemerintah akan sebagaaimana penaafsiran tersebut. Melalui proses penafisran ini kemudian aktivis HTI memiliki persepsi terhadap pemerintah, yang menjadi acuan bagi aktivis HTI untuk menyikapi situasi dan kondisi sebagaimana yang dipersepsikannya. Hal ini sesuai dengan ide dasar teori interaksionisme simbolik bahwa manusia bertindak atau bersikap terhadap orang lain dilandasi atas pemaknaan kepada orang lain, kemudian pemaknaan-pemaaknaan itu muncul daari interaksi social yang dipertukarkan di antara manusia.

2. Pikiran (*mind*) dan Konsep Diri (*Self*) Aktivis HTI terhadap Pancasila dan NKRI Pascapenetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Aktivis HTI sebelumnya memang memiliki pandangan yang dapat dikatakan memiliki kesamaan terhadap Pancasila dan NKRI. Semenjak berdirinya bangsa Indonesia dalam konsep negara saja yang dapat dilacak dari buku sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di antaranya sesama umat Islam sudah memiliki berbagai perbedaan dalam membuat Undang-Undang Negara. Sebagaimana yang terjadi dalam piagam Jakarta, sehingga harus diputuskan sila

[10] Wawancara dengan saudara Ridoi mahasiswa Universitas Negeri jember, 27 Agustus 2018.

ke satu harus dirubah sesuai kesepakatan bersama demi menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang diungkapkan seorang informan.

> "Menurut saya bahwa Pancasila dan NKRI adalah produk manusia, yang dapat dikatakan sifat kebaikan dan kebenarannya bersifat relatif, berbeda dengan produk yang berasal dari agama, yakni Islam yang berdasarkan hukum Allah dan Sunnah (Nabi), kebenarannya mutlak. Mengapa masih saja mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila termasuk adalah produk manusia Indonesia yang terkontaminasi produk Barat yaitu produk kapitalisme."[11]

George Herbert Mead mengemukakan bahwa individu-individu di dalam lingkungan sosial tidak dilihat sebagai unit-unit yang termotivasi oleh kekuatan-kekuatan eksternal dan internal di luar kendali mereka, atau di dalam batas-batas suatu struktur yang kurang lebih tetap. Melainkan lebih tepatnya, individu-individu tersebut sebagai unit-unit reflektif atau berinteraksi yang membentuk entitas masyarakat.[12] Artinya, kemampuan berpikir mampu membuat seseorang bertindak secara reflektif dari pada hanya sekedar tindakan secara tidak reflektif. Ada proses interaksi dengan diri sendiri sebelum melakukan suatu tindakan tertentu.

> "Aktivis HTI itu seseorang yang memiliki jiwa aktif dan reaksionisme akan selalu tanggap terhadap persoalan umat. Ketika kita mendengar kata aktivis HTI, biasanya dalam konteks pemahaman agamanya lebih kuat dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sementara itu jika dilihat dalam konteks bagaimana aktivis HTI berperilaku? Kalau saya pribadi, aktivis HTI memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama saudara muslim. Aktivis HTI memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial di masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umat.[13]

> "Aktivis HTI adalah orang yang mengikuti syariat Islam, kekhilafahan adalah ciri utama dalam kepemimpinan, apakah Negara maupun jamaah, sebagaimana aturan yang dikomandoi oleh kelompok pimpinan HTI, karena kita memiliki cara pandang dengan kelompok muslim lainnya. Kedekatan diantara sesama kelompok aktivis HTI seperti nggak ada batas. Kalau ada kegiatan akan dilakukan secara bersama. Demikian pula ada salah satu individu dari kempok HTI yang mengalami kesusahan

[11] Wawancara, Abdul Aziz, 6 September 2018.
[12] George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Classical Sociological Theori* (Mc Graw-Hill,2004), 626.
[13] Wawancara dengan Kurniawan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, 4 September 2018.

akan segera sigap, secara bersama untuk cepat menolongnya, aktivis HTI harus dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat mereka tinggal bersama masyarakat.[14]

Dengan demikian diri (*self*) aktivis HTI merupakan bentuk definisi kepada kekompakan dan keguyupan berjamaah dalam menghadapi persoalan umat Islam. Aktivis HTI sebagai individu berjiwa sosial dengan responsive terhadap situasi masyarakat, objek, dan bahkan kepada diri sendiri yang kemudian menentukan tindakannya. Namun, yang perlu digaris bawahi bahwa tindakan diri (*self*) aktivis HTI tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan, impuls, tuntutan budaya atau tuntutan peran, melainkan tindakan aktivis HTI hanya didasarkan pada definisi atau penafsiran aktivis atas objek-objek di sekelilingnya sendiri, sehingga di antara pikiran (*mind*) dan diri (*self*) aktivis HTI menjadi bagian dari tindakan sosial. Aktivis HTI mendefinisikan dirinya sebagai orang yang sedang memiliki *jihad fi sabilillah*. Dengan kata lain, aktivis HTI adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang lebih baik dari pada orang yang bukan aktivis HTI. Kemudian sigap dengan persoalan umat, menjaga dan menjalankan nilai-nilai Islam, norma, etika, dan budaya yang ada di masyarakat.

George Herbert Mead mengatakan diri secara dialektis berhubungan dengan pikiran. Tubuh bukan suatu diri dan menjadi suatu diri hanya bila pikiran telah berkembang. Sementara di sisi lain, diri bersama kerefleksifannya, sangat penting bagi perkembangan pikiran. Berpikir merupakan interaksi oleh diri orang yang bersangkutan dengan orang lain. Tidak ada pikiran (*mind*) yang timbul lepas bebas dari situasi sosial, namun ia memiliki keterkaitan di mana diri (self) berada.[15] Dengan demikian, apa yang menjadi konsep diri (*self*) aktivis HTI merupakan hasil dari proses berpikir (*mind*) yang terkait dengan keberadaan aktivis HTI yang berada di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam interaksi sosial muncul pikiran (*mind*) dan konsep diri (*self*) aktor yang merupakan bagian esensi dalam tindakan sosial, sehingga mereka saling

[14]Wawancara dengan Siti Hamidah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, 4 September 2018.

[15]Umiarso dan Elbandiasyah, *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 190.

mempengaruhi menyesuaikan diri dan saling mencocokkan tindakan-tindakan mereka. Sebagaiamana aktivis HTI saat berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya, yakni sebagai tindakan sosial setelah bersosialisasi dengan berbagai komunitas ia harus dapat beradaptasi, berinteraksi dengan siapa saja. Artinya, kesadaran diri terbangun oleh pikiran (*mind*) aktivis HTI yang merefleksikan kenyataan sosial di sekitar mereka, sehingga berusaha untuk mencocokkan satu samalain.

B. Bentuk-bentuk Polarisasi Aktivis HTI di Perguruan Tinggi Jember terhadap Pancasila dan NKRI Pascaditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Bentuk polarisasi yang dialami oleh aktivis HTI di perguruan tinggi Jember, adalah di internal aktivis HTI memiliki pandangan yang berbeda.Salah satunya adalah aktivis HTI yang sebelumnya adalah menjadi nara sumber atau ustadz yang mengisi di LDK (Lembaga Dakwah kampus) untuk para aktivis HTI, adalah karena kurangnya pemahaman mereka terhadap agama. Dalam artian bahwa agama dipahami secara tekstual belaka, sehingga dalam memahami keberadaan Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia dianggap produk kapitalisme yang tidak berdasarkan syariat Islam.

> "Saya sewaktu menjadi aktivis HTI aktif dan mengisi LDK bagi kalangan aktivis HTI di kampus apakah di STAIN Jember waktu itu sebelum jadi IAIN Jember. Saya waktu itu juga mengisi di LDK Universitas Negeri Jember, kebanyakan dari aktivis HTI dalam memaknai dan memahami agama masih sebatas kulit, bukan pada substansinya. Sehiangga produk Pancasila tidak sesuai syariat Islam. Sebenarnya yang dapat disesuaikan dengan syariat Islam adalah pola piker dan minset manusianya, bukankah banyak saudara-saudara islam tetapi dalam perilakunya jauh menyimpang dari Islam. Apabila menurut pandangan saya, bahwa Pancasila tidaklah menyimpang dari syariat Islam. Penyimpangan dengan syariat Islam tersebut adalah perilaku manusianya yang senantiasa menganggap dirinya paling benar dan tidak dapat mengontrol sikap dengan pandangan orang lain, sehingga orang lain tampak salah. Padahal sesungguhnya karena pengetahuan yang terbatas dan kedangkalan ilmu serta terjebak dengan doktrin yang kaku, sehingga kurang menghargai pendapat orang lain."[16]

Pendapat lain yang dikemukakan seorang informan, dalam pandangannya bahwa Negara Indonesia untuk dapat mensejahterakan rakyatnya, maka seharusnya sistem kekhalifahan berdasarkan syariat Islam harus ditegakkan di muka bumi Indonesia. Karena

[16] Wawancara, Moh. Hasim, 7 September 2018.

perilaku manusia Indonesia yang tidak menjalankan syariat Islam sehingga hukum-hukum Tuhan ditabraknya, fenomena korupsi merajalela, kemiskinan bertambah, dan kejahatan semakin massif. Mengapa Negara yang kaya akan sumber daya alam, di sisi lain rakyatnya miskin. Pendapat seperti ini dikemukakan Suyanto aktivis HTI dari Universitas negeri Jember. Ia juga mengeksplorasi pendapatnya sebagai berikut.

> "Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun karena sistem pemerintahan yang dijalankannya tidak berdasarkan syariat Islam, bukan sistem kekhalifahan sehingga manusia-manusia Indonesia jauh dari tuntunan Allah. Pancasila merupakan sumber yang tidak sesuai syariat Islam sehingga wajar apabila pemerintahannya dengan menjalankan roda pemerintahan sesuai kehendak dirinya, hal inilah yang merupakan sumber bencana yang menyengsarakan rakyat."[17]

Di lain pihak polarisasi juga terjadi di dalam internalisasi diri aktivis HTI. Ia adalah seorang dosen yang berstatus ASN. Ketika pemerintah memberikan kebijakan kepada ASN yang tidak patuh terhadap NKRI dan Pancasila, pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi memberikan tawaran kepada aktivis HTI yang masuk dalam ASN dan kepada siapa saja ASN lain yang menentang kebijakan pemerintah untuk keluar dari institusi pemerintah.[18] Demikian pula salah satu ASN yang kurang setuju dengan bentuk negara NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara, ia lebih condong untuk bersikap pasif ketika berhadapan dengan ASN yang lain dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan dirinya agar tetap eksis menjadi ASN, seolah tidak berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Meskipun dalam hati mereka sesungguhnya sangat menentang kebijakan pemerintah RI. Akan tetapi karena kondisi yang membuatnya harus taat pada sistem pemerintah, ia lebih bersikap pasif seakan sejalan agar aktif dan aman sebagai ASN. Ketika bersosialisasi dengan kelompoknya ia akan kembali berpaham kekhalifahan dan syariat Islaam, Sebaliknya jika ia berada di lingkungan pemerintah, seakan ia patuh terhadap pemerintah. Sikap hipokrit, inkonsistensi ini menjadi strategi *siyasah* sikapnya ketika mereka berada dalam komunitas yang berbeda. Namun subsatansinya ia mengingkari Pancasila dan NKRI.[19]

---

[17] Wawancara, Suyanto, aktivis HTI Universitas Negeri Jember, 5 September 2018.
[18] Wawancara, Suyanto, aktivis HTI Universitas Negeri Jember, 5 September 2018.
[19] Wawancara, Moh. Hasim, staf administrasi Universitas Negeri Jember, 6 September 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk komunikasi secara konseptual yang dapat menimbulkan disharmonisasi antarkelompok sesama masyarakat sipil, sebab tidak semua masyarakat sepakat dengan pemahaman aktivis HTI. Demikian pula dapat menyebabkan adanya disharmonisasi dengan pemerintah akibat adanya pemaknaan dan pemahaman aktivis HTI, yakni *"mindset"* peran yang signifikan membentuk pikiran mereka dalam meneropong konsep yang dijadikan landasan oleh pemerintah dimaknai dengan pemahaman yang tidak Islami, bukan berlandaskan Alquran dan Assunnah sehingga konsep yang dijadikan landasan bagi pemerintahan RI dianggap oleh aktivis HTI tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan rakyat Indonesia, demikian pula rasa keadilan belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dan seringkali kebijakannya hanya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu. Sikap yang demikian itu, menurut anggapan aktivis HTI merupakan ajaran kapitalisme Barat yang lebih dominan menguntungkan kelompok yang memiliki modal atau kapital, hal inilah yang menjadi perhatian dan penolakan aktivis HTI terhadap landasan yang dijadikan pijakan oleh Negara.
2. Polarisasi di internal aktivis HTI sendiri sebenarnya disebabkan adanya keterbatasan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh aktivis HTI itu sendiri. Ketika pengetahuan mereka mengenai agama hanya dipahami secara tekstual, dan buku-buku pedoman yang dijadikan acuan dan pegangan hidup mereka konsumsi secara terus menerus tanpa mau menerima kritikan orang lain, akibatnya mereka cenderung bersikap keras terhadap pemerintahan RI. Sebaliknya bagi mereka yang memiliki pengetahuan luas dan mau bersosialisasi dengan kelompok lain, serta terbuka untuk dikritisi, mereka memiliki sikap yang berbeda dengan kelompok aktivis HTI yang pertama. Kelompok aktivis HTI yang kedua, yang memiliki pengetahuan luas ini lebih toleran dan memiliki strategi bagaimana cara mereka ketika berhadapan dengan kelompok pemerintah agar dapat diterima oleh kelompok lain. Cara yang ditempuh

oleh kelompok aktivis HTI yang kedua ini, *siyasah* yang dibangun ketika mereka berhadapan dengan kelompok pemerintah, mereka senantiasa seakan-akan sepakat dan setuju dengan konsep landasan negara yang ditawarkan pemerintah. Akan tetapi sebaliknya, ketika aktivis HTI berhadapan dengan kelompok mereka sendiri, sikap mereka anti terhadap pemerintah RI.

B. Implikasi Teoretik

Secara teoretik, temuan ini akan berimplikasi langsung pada komunikasi pemerintah RI berhadapan dengan aktivis HTI. Bahwa konsep Pancasila dan NKRI yang tidak diimplementasikan oleh pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara berkeadilan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini akan membawa semakin massifnya gerakan aktivis HTI untuk bercokol kembali pascapenetapan Perppu No 2 tahun 2017.

Pascapenetapan Perppu No 2 tahun 2017, setidaknya peran pemerintah dapat menjalankan amanah yang dikonseptualisasikan dalam Pancasila dan NKRI, pemerintah seharusnya dapat melaksanakan perannya mensejahterakan rakyatnya, menjaga komitmennya membawa masyarakat dalam kehidupan yang layak. Akibat adanya ketidakadilan, kemiskinan yang menjerat rakyat semua itu tidak lepas dari tidak maksimalnya peran pemerintah dalam menjalankan landasan negara.

C. Keterbatasan Studi

Melihat fenomena-fenomena yang ada dalam kajian aktivis HTI di lingkungan Perguruan Tinggi Jember, keadaannya begitu kompleks. Dengan kondisi yang demikian, peneliti perlu memberikan garis-garis demarkasi, arahan terhadap kajian aktivis HTI Pascapenetapan Perppu Nomor 2 tahun 2017, sehingga kajian yang diharapkan dapat memperoleh sesuai dengan fokus yang menjadi perhatian peneliti. Dengan memfokuskan perhatian pada garapan yang sesuai keahlian peneliti, maka akan menghasilkan kajian yang kurang lebih tidak mengecewakan.

Sebagaimana kalau kita perhatikan dalam kajian aktivis HTI ini, yaitu Polarisasi pandangan aktivis HTI terhadap Pancasila dan NKRI dan keterkaitan Pascapenetapan Perppu Nomor 2 tahun 2017. Demikian pula, adanya kondisi masyarakat akan selalu

berubah dan berkembang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang dihadapinya, searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kompleks. Jika demikian, tidak menutup kemungkinan sikap-sikap yang dilakukan aktivis HTI akan dapat mengalami berbagai perubahan.

Berkaitan dengan penelitian aktivis HTI ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan pendalaman untuk melakukan penelitian ini. Sekalipun memang demikian, dalam ranah penelitian kualitatif, penulis melihat masih banyak celah yang bisa dilakukan oleh peneliti lain, apakah yang berkaitan dengan mengkategorisasi atau mempolakan peran aktivis HTI Pascapenetapan Perppu Nomor 2 tahun 2017 misalnya. Seperti dalam penelitian ini yaitu bagaimana penulis membuat kerangka teoretik tentang polarisasi pandangan aktivis HTI terhadap Pancasila dan NKRI pascapenetaapan Perppu Nomor 2 tahun 2017.

D. Rekomendasi

Pemerintah Republik Indonesia perlu mensosialisasikan bahwa pemahaman agama yang diajarkan dalam dunia pendidikan formal, bukan hanya dalam pemahaman yang sempit tekstual. Akan tetapi masyarakat terdidik terutama di perguruan Tinggi yakni bagi mahasiswa harus diberikan pemahaman agama secara luas dan mendalam. Sehingga mahasiswa tidak terjebak pemahaman yang sempit dan menyesatkan dapat merusak keharmonisan masyarakat Indonesia. Di samping itu pemerintah juga punya peran yang signifikan, bagaimana dapat mensejaahterakan masyarakat secara berkeadilan dan dapat hidup layak di tengah persaingan global. Akibat kemiskinan tersebut, sehingga masyarakat mudah diarahkan oleh pemain-pemain atau pihak asing yang berkepentingan ingin merusak keharmonisan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sudah memiliki budaya saling toleransi, oleh pihak lain ingin dibenturkan sesama masyarakat yang saling berhadap-hadapan ingin memecah belah bangsa. Apabila hal ini tidak segera diatasi, dapat memungkinkan terjadinya konflik berkepaanjangan sebagaimana yang dialami negara Timur Tengah. Dengan sikap saling membangun dari semua komponen bangsa, hendaknya dapat menjaga dan menahan serta tidak memaksakan kehendak apabila terjadi perbedaan pemahaman, sehingga diharapkan toleransi dapat tetap terjaga.

BIBLIOGRAFI

Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al Azhar Press, tt.).

Abdul Aziz dkk., *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989).

Abu Afif dan Nur Khalish, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000).

Abu Za'rur, *Seputar Gerakan Islam*, terj. Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).

Amin Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan 2001).

Ahmad Arupatria, *Gerakan Hizbut Tahrirut Tahrir*: Kajian Tentang Teologi dan Perjuangan Politik dalam Upaya Mendirikan Daulah Islamiyah (Yogyakarta: Skripsi UPN, 2003).

Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001).

Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Cet. I* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2005).

Farid Wadjdi, *al-Wa'ie* (Bogor: Pimred *al Wa'ie*, 2005).

Feriawan A.N., FSLDK Berhenti Berharap?, dalam *Special Report, Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1/2004.

George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010).

Haris Supratno, "Wayang Sasak Lakon Dewi Rengganis dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Lombok: Kajian Sosiologi Kesenian" (Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 1996), 102-103, dan Sunarto, *Dasar-dasar dan Konsep Penelitian* (Surabaya: Program Pascasarjana IKIP Surabaya, 1997).

Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat Dan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000).

Hizbuttahrirut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis* (Jakarta: Pustaka Thoriqul Izzah, 2000).

Hizbut Tahrirut Tah-rir Indonesia, *Dakwah Islam Tanpa Kekerasan* (Indonesia: HTI, 2003).

Haedar, Nashir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia.* (Jakarta: PSAP, 2007).

Irwan Omar, *Kegagalan HTI dan PKS Sebagai Gerakan Counter Hegemoni,* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2009).

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001).

James P. Spradley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).

J. Taylor dan Steven Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings* (New York: John Wiley dan Son Inc., 1984).

Jubir HTI, "Wacana Penting Untuk Perubahan dan Tegaknya Khilafah", dalam *http://hizbut- tahrir.or.id/category/hizbut-tahrir/page/2/*

Khandakar Elahi dan Constantine P Danopoulos, "Democracy, Capitalism and Development", dalam *Journal of Security Sector Management*, Volume 2 Number 2-June 2004.

Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2003).

KH. Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).

M.Abdul Majid al-Khalidi, *Analisis Dialektik Kaidah Pokok Sistem Pemerintah Islam,* terj. Harits Abu Ulya, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004).

Maftuh Abegebriel dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta: SR-Ins, 2004).

Majalah *Sabili*, No.9 Th. X, *Edisi Khusus Sejarah Emas Muslim Indonesia*, 2003.

Miriam *Budiardjo*, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2000).

RANCANGAN ANGGARAN DAN BIAYA
POLARISASI PERSPEKTIF HTI (HIZBUT TAHRIR INDONESIA) DI PERGURUAN TINGGI JEMBER DALAM MEMAHAMI IDEOLOGI PANCASILA DAN NKRI PASCA PENETAPAN PERPPU NO.2 TAHUN 2017

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Frek	Sat	Harga Satuan	Jumlah	Pajak	Ket
A.	**Pra Kegiatan**							
	Penyempurnaan proposal:							
	Honor Narasumber	1	6	JPL	500.000	3.000.000	150.000	
	Moderator	1	1	keg	250.000	250.000	12.500	
	Transportasi	10	1	keg	100.000	1.000.000		
	Konsumsi	10	1	OA	30.000	300.000		
B.	**Pelaksanaan**							
	Pengumpulan Data							
	Uang Harian	3	27	O/Keg	200.000	16.200.000		
	Transportasi	3	27	O/Keg	100.000	8.100.000		
	Konsumsi	3	27	Keg	30.000	2.430.000		
	Penggalian Data Lapangan							
	Honor Narasumber	7	1	JPL	500.000	3.500.000	175.000	
	Penyusunan Laporan:							
	Transportasi	4	6	O/Keg	100.000	2.400.000		
	Konsumsi	4	6	O/Keg	30.000	720.000		
C.	**Bahan**							
	Copy literatur buku	4	1	buku	35.000	140.000		
	Kertas A4	9	1	Rim	40.000	360.000		
	Flasdisk	3	1	Buah	150.000	450.000		
	Tinta Printer	2	1	botol	75.000	150.000		
	Balpoint	1	1	Box	70.000	70.000		
	Map Sneil	3	1	Pack	60.000	180.000		
	Spanduk/bacground	1	2	keg	250.000	500.000		
	Sewa Lcd proyrktor	1	1	Keg	250.000	250.000		
	Voice Recorder	1	1	Buah	700.000	700.000		
	Cetak Laporan Penelitian	6	1	Eks	50.000	300.000		
	Total					**41.000.000**	**337.500**	

Jember, Desember 2018
Ketua Tim Penelitian,

Dr. Akhiyat, M.Pd

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM MODERATOR
PENYEMPURNAAN PROPOSAL PENELITIAN
POLARISASI PERSPEKTIF HTI (HIZBUT TAHRIR INDONESIA) DI PERGURUAN TINGGI JEMBER
DALAM MEMAHAMI IDEOLOGI PANCASILA DAN NKRI
PASCA PENETAPAN PERPPU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	Keg	HONOR 250.000	GOL	PPH		Jumlah Diterima	TANDA TANGAN
1	Mawardi Purbo Sanjoyo, MA	1	250.000	III	5%	12.500	237.500	1
Jumlah							**237.500**	

Jember, September 2018
Ketua Tim Penelitian,

Dr. Akhiyat, M.Pd

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM NARASUMBER
PENYEMPURNAAN PROPOSAL PENELITIAN
POLARISASI PERSPEKTIF HTI (HIZBUT TAHRIR INDONESIA) DI PERGURUAN TINGGI JEMBER
DALAM MEMAHAMI IDEOLOGI PANCASILA DAN NKRI
PASCA PENETAPAN PERPPU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA NARASUMBER	JPL	HONOR 500.000	GOL	PPH		Jumlah Diterima	TANDA TANGAN
1	Win Usuluddin, M.Hum	6	3.000.000	III	5%	150.000	2.850.000	1
Jumlah							**2.850.000**	

Jember, September 2018
Ketua Tim Penelitian,

Dr. Akhiyat, M.Pd

DAFTAR PENERIMA UANG TRANSPORT PESERTA
PENYEMPURNAAN PROPOSAL PENELITIAN
POLARISASI PERSPEKTIF HTI (HIZBUT TAHRIR INDONESIA) DI PERGURUAN TINGGI JEMBER
DALAM MEMAHAMI IDEOLOGI PANCASILA DAN NKRI
PASCA PENETAPAN PERPPU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	Uang Transport 100.000	Jumlah Diterima	TANDA TANGAN
1	Win Usuludin	100.000	100.000	1
2	Mawardi Purbo Sanjoyo	100.000	100.000	2
3	Mastur	100.000	100.000	3
4	Muhammad Faisol	100.000	100.000	4
5	Ahmad Fajar Shodik	100.000	100.000	5
6	Abdullah Dardum	100.000	100.000	6
7	Uun Yusufa	100.000	100.000	7
8	Moh. Salman Hamdani	100.000	100.000	8
9	Ahmad Syukron Latif	100.000	100.000	9
10	Dimas Surya	100.000	100.000	10
Jumlah		1.000.000	1.000.000	

Jember, September 2018
Ketua Tim Penelitian,

Dr. Akhiyat, M.Pd

3 - 9 - 2018

Tuan / Toko Bpk Akhirzal

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
10 Kotak	Nasi padang	30.000	300.000

"AMPERA MURNI"
MASAKAN PADANG
CABANG BANGIL
Menerima Pesanan Nasi Kotak Nasi Bungkus
Jl. Hayam Wuruk 162 Bangil Jember

Jumlah Rp. 300 . 000

Tanda Terima

Hormat kami,

DAFTAR PENERIMA UANG HARIAN
TIM PENGUMPULAN DATA
POLARISASI PERSPEKTIF HTI (HIZBUT TAHRIR INDONESIA) DI PERGURUAN TINGGI JEMBER
DALAM MEMAHAMI IDEOLOGI PANCASILA DAN NKRI
PASCA PENETAPAN PERPPU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	KEG	Uang Harian	Jumlah Diterima	TANDA TANGAN	
			200.000			
1	Mawardi Purbo Sanjoyo	27	5.400.000	5.400.000	1	
2	Ahmad Zainuri	27	5.400.000	5.400.000		2
3	Lukman Al Hakim	27	5.400.000	5.400.000	3	
Jumlah			**16.200.000**	**16.200.000**		

Jember, Desember 2018
Ketua Tim Penelitian,

Dr. Akhiyat, M.Pd

DAFTAR PENERIMA UANG TRANSPORT
TIM PENGUMPULAN DATA
POLARISASI PERSPEKTIF HTI (HIZBUT TAHRIR INDONESIA) DI PERGURUAN TINGGI JEMBER DALAM MEMAHAMI IDEOLOGI PANCASILA DAN NKRI PASCA PENETAPAN PERPPU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	KEG	Uang Transport 100.000	Jumlah Diterima	TANDA TANGAN	
1	Mawardi Purbo Sanjoyo	27	2.700.000	2.700.000	1	
2	Ahmad Zainuri	27	2.700.000	2.700.000		2
3	Lukman Al Hakim	27	2.700.000	2.700.000	3	
Jumlah			**8.100.000**	**8.100.000**		

Jember, Desember 2018
Ketua Tim Penelitian,

Dr. Akhiyat, M.Pd

17 - 12 - 19

Tuan / Toko Bpk Akhyar

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
24 kotak	Nasi padang	30000	720.000

"AMPERA MURNI"
MASAKAN PADANG
CABANG BANGIL
Menerima Pesanan Nasi Kotak
Jl. Hayam Wuruk 162 Mangli

Jumlah Rp. 720.000

Tanda Terima

Hormat kami,

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM NARASUMBER
PENGGALIAN DATA LAPANGAN
POLARISASI PERSPEKTIF HTI (HIZBUT TAHRIR INDONESIA) DI PERGURUAN TINGGI JEMBER
DALAM MEMAHAMI IDEOLOGI PANCASILA DAN NKRI
PASCA PENETAPAN PERPPU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA NARASUMBER	JPL	HONOR 500.000	GOL	PPH		Jumlah Diterima	TANDA TANGAN
1	Vira	1	500.000	III	5%	25.000	475.000	1
2	Feri	1	500.000	III	5%	25.000	475.000	2
3	Ridho'i	1	500.000	III	5%	25.000	475.000	3
4	Kurniawan Raharjo	1	500.000	III	5%	25.000	475.000	4
5	Siti Hamidah	1	500.000	III	5%	25.000	475.000	5
6	Abd. Aziz	1	500.000	III	5%	25.000	475.000	6
7	Suyanto	1	500.000	III	5%	25.000	475.000	7
Jumlah			**3.500.000**			**175.000**	**3.325.000**	

Jember, Desember 2018
Ketua Tim Penelitian,

Dr. Akhiyat, M.Pd

DAFTAR PENERIMA UANG TRANSPORT
PENYUSUNAN LAPORAN
POLARISASI PERSPEKTIF HTI (HIZBUT TAHRIR INDONESIA) DI PERGURUAN TINGGI JEMBER
DALAM MEMAHAMI IDEOLOGI PANCASILA DAN NKRI
PASCA PENETAPAN PERPPU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	KEG	Uang Transport	Jumlah Diterima	TANDA TANGAN	
			100.000			
1	Akhiyat	6	600.000	600.000	1	
2	M. Uzaer Damairi	6	600.000	600.000		2
3	Mawardi Purbo Sanjoyo	6	600.000	600.000	3	
4	Dimas Surya	6	600.000	600.000		4
Jumlah			**2.400.000**	**2.400.000**		

Jember, Desember 2018
Ketua Tim Penelitian,

Dr. Akhiyat, M.Pd

17 - 12 - 19

Tuan / Toko Bpk Akhyat.

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
24 kotak	Nasi padang	30000	720.000

"AMPERA MURNI"
MASAKAN PADANG
CABANG BANGIL
Menerima Pesanan Nasi Kotak Nasi Box
Jl. Hayam Wuruk 162 Mangli Jember

Jumlah Rp. 720.000

Tanda Terima

Hormat kami,

10 Sept 2019

Tuan / Toko: Akhiyat

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
4 exp	Fotokopi + jilid	35.000	140.000
9 Rim	Kertas A4	40.000	360.000
3 buah	Flasdisk 16GB	150.000	450.000

Aranaika
One Stop Office Solution
Jl. Moh. Yamin No 43 Jember HP. 085331012013

Jumlah Rp. 950.000

Tanda Terima

Hormat kami,

1 September 2019

Tuan / Toko: Akhiyat

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2 botol	Tinta Printer	75.000	150.000
1 Box	Ballpoin	70.000	70.000
3 Pack	Map STNAL	60.000	180.000
2 buah	Baner 2x5M	250.000	500.000

Percetakan • Foto Copy • Sablon • ATK
BURSA MAHASISWA
Jl. Kalimantan 61 0331-332688
Flexi 7779991, HP. 081 2323 8994
Fax. 0331-327873

Jumlah Rp. 900.000

Tanda Terima

Hormat kami,

1 September 2019

Tuan Toko: Bpk Akiyat

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Sewa LED	250.000	250.000

"BAROKAH"
SHOOTING & EDITING
Perum Mutiara C 7/8 Mangli

** Barang yang sudah di beli, tidak bisa ditukar atau dikembalikan **

Jumlah Rp. 250.000

Tanda Terima

Hormat kami,

JBR. 4-09-2019

Tuan Toko: Akiyat

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Buah	Pembelian Voice Recorder Sony	700.000	700.000

el-Hamra
Advanced Technology Partner

Jumlah Rp. 700.000

Tanda Terima

Hormat kami,

---

24 Desember 19

Tuan Toko: Akhiyat

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
6 ext	Fotokopi + Jilid	50.000	300.000

Percetakan • Foto Copy • Sablon • ATK
BURSA MAHASISWA
Jl. Kalimantan 61 0331-332688
Flexi 7779991, HP. 081 2323 899
Fax. 0331-321073

Jumlah Rp. 300.000

Tanda Terima

Hormat kami,

10-12-18

Tuan Toko: Bpk. Akhiyat

NOTA NO. .....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
81 box	Nasi campur	30.000	2.430.000

"AMPERA MURNI"
MASAKAN PADANG
CABANG BANGIL
Menerima Pesanan Nasi Kotak Nasi Bungkus
Jl. Hayam Wuruk 162 Mangli Jember

Jumlah Rp. 2.430.000

Tanda Terima

Hormat kami,